

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**
**Studi Deskriptif Kualitatif Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta
Tahun 2009**



Disusun oleh:

ANGGITA PERMANA PUTRI
D 0105036

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN

Diajukan Untuk Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing,

Drs. Son Haji, M.Si.
NIP. 131 791 173

PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada Hari/ Tanggal:

Tim Penguji

Drs. Pramono, SU
NIP. 130 814 562

(.....)
Ketua

Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I.
NIP. 132 309 136

(.....)
Sekretaris

Drs. Son Haji, M.Si.
NIP. 131 791 173

(.....)
Penguji

Mengetahui,

Dekan

Drs. H. Supriyadi SN., SU
NIP. 130 936 616

MOTTO

- ❏ Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan.
- ❏ Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
- ❏ Bacalah dan Tuhan-Mu lah yang maha pemurah
- ❏ Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam
- ❏ Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Al Alaq: 1-5)

- ❏ Yakinkanlah karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia asal kau yakin kau mampu meraihnya. Jangan ragu, jangan takut, dan mimpi itu akan menjadi nyata.

(Ary Ginanjar)

- ❏ I am only one, but I am still one. I can not do everything, but still I can do something. And because I can not do everything I will not refuse to do the something that I can do.

(Hellen Keller)

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang terdalam
Kupersembahkan karya ini untuk:

ALLAH SWT,

Yang telah memberikan hidayah dan rahmat untuk tetap berpegang teguh di jalan-
Nya dan untuk segala kemudahan dan keberuntungan yang tak terduga.

Bapak dan Ibu tercinta,

Atas pengorbanan dan perjuangannya, limpahan kasih sayang, doa dan bimbingan
yang tiada henti terhadap ananda.

Uthiet dan Bobo,

Adik-adik yang memberikan semangat dan motivasi.

Om dan Tante,

Yang banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT pencipta alam semesta. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad saw beserta para sahabat dan keluarga setia pengikutnya yang setia hingga akhir nanti.

Sudah menjadi takdir Allah bahwa ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan skripsi ini. Penulis menyadari masih ada kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu berbagai kritik dan saran serta masukan lainnya sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada penulisan ataupun penelitian di waktu mendatang.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Bapak Drs. Son Haji, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
- b. Ibu Rutiana Dwi W., S.Sos., M.Si. selaku pembimbing akademis yang telah membimbing penulis selama kuliah.
- c. Bapak Drs. Sudarto, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS.
- d. Bapak Suyono, SIP., M.Hum selaku kepala Kelurahan Laweyan yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- e. Ibu Sri Martani, Ibu Dewi Waraswati, Ibu Radian, Bapak Y. Suranto, S.Pd., Bapak Drs. H. Zulfikar Husain, Bapak Widiarso, S.E, dan

Bapak Drs. HM. Idris Sugiyanto, S.H, M.H. selaku informan yang telah banyak memberikan informasi berupa data primer dan sekunder sebagai materi analisis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

- f. Sepupu-sepupu ku yang lucu-lucu. Widha, Puput, Iwik, dan Saphira, semoga bisa secepatnya lulus dan sukses.
- g. Teman-teman HMI Cabang Surakarta Komisariat Fisip UNS yang telah banyak memberikan pembelajaran berharga dalam berorganisasi dan terimakasih juga untuk kekeluargaan yang selama ini terbangun (YAKUSA).
- h. Teman-teman AN' 05 yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya. Nantinya setelah lulus, kita semua harus sukses dan berhasil.
- i. Sahabat-sahabat ku: Aroem, Itha, Firman, Nofika, Rizka, Novie, Hana, Yusthie, Eyhien, Uyhie, Puji, Inuee, Mega, mas Beni, mas Burhan, Bimo, Timbul. Yang belum lulus, ayo wisuda bareng-bareng.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, 11 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	14
1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14
2. Kajian Tentang Gender	30
F. Kerangka Berpikir	37
G. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	41
3. Sumber Data	42
4. Teknik Pengambilan Sampel	42
5. Teknik Pengumpulan Data	43
6. Validitas Data	44
7. Teknik Analisis Data	45

BAB II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	46
A. Deskripsi Kota Surakarta	46
B. Deskripsi Kelurahan Laweyan	47
1. Keadaan Geografis	47
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Laweyan	48
3. Keadaan Demografis Umur Dan Jenis Kelamin	50
4. Mata Pencaharian	51
5. Tingkat Pendidikan	52
6. Penduduk Menurut Agama	54
7. Sarana Pendidikan	55
8. Sarana Perekonomian	55
9. Sarana Kesehatan	56
10. Sarana Komunikasi	56
11. Sarana dan Prasarana Transportasi	57
12. Keadaan Rumah Penduduk	58
BAB III. PEMBAHASAN	59
A. Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009	59
1. Pra Musrenbangkel I	60
2. Pra Musrenbangkel II	64
3. Musrenbangkel	65
B. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel	68
C. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel	71
D. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel	79
E. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Dalam Musrenbangkel	85
F. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi	87
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Unsur Peserta Yang Mengikuti Musrenbangkot Surakarta	
Tahun 2007	9
Tabel 1.2 Unsur Peserta Yang Mengikuti Musrenbangkel Laweyan	
Tahun 2007	11
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	52
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Banyaknya Pemeluk Agama	54
Tabel 2.4 Sarana Pendidikan	55
Tabel 2.5 Sarana Perekonomian	55
Tabel 2.6 Sarana Kesehatan	56
Tabel 2.7 Sarana Komunikasi	57
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Transportasi.....	57
Tabel 2.9 Keadaan Rumah Penduduk.....	58
Tabel 3.1 Unsur-Unsur Peserta Pra Musrenbangkel I	60
Tabel 3.2 Prosentase Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Laweyan 2009.....	69
Tabel 3.3 Komposisi Peserta Sidang Komisi Musrenbangkel Laweyan 2009	77
Tabel 3.4 Komposisi Panitia Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009	
Menurut Jenis Kelamin	80
Tabel 3.5 Rekap Usulan Masyarakat Dalam Forum Musrenbangkel Laweyan	
Tahun 2009.....	86
Tabel 3.6 Usulan Masyarakat Yang Diusulkan ke Musrenbangcam Laweyan	
Tahun 2009	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Laweyan	49
1.2 Piramida Penduduk Kelurahan Laweyan	50

ABSTRAK

ANGGITA PERMANA PUTRI, D0105036, Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Deskriptif Kualitatif Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2009, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif ditinjau dari aspek aktivitas, akses, kontrol dan manfaat perencanaan pembangunan partisipatif bagi perempuan serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagai wilayah yang dikenal dengan “Kampung Batik Laweyan” dan juga sebagai wilayah dengan karakteristik penduduk yang heterogen. Bentuk penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti perempuan yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, aparat kelurahan, pengurus LPMK, pengurus RT dan pengurus RW, dan panitia penyelenggara perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, teknik lain yang digunakan adalah FGD (*Focus Group Discussion*), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan teknik analisis gender model Harvard. Dalam penelitian ini validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data dengan menggunakan beberapa sumber untuk menjamin kevaliditasannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Kehadiran perempuan di musrenbangkel Laweyan belum mencapai kuota minimal 30%, sekalipun demikian perempuan aktif didalam forum. (ii) Akses perempuan didalam musrenbangkel Laweyan melalui sidang komisi paling banyak berada di komisi social budaya. (iii) Kontrol perempuan di dalam musrenbangkel Laweyan masih kurang karena posisi perempuan sebatas anggota. (iv) Musrenbangkel sangat memberikan manfaat bagi perempuan untuk mewujudkan aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan perempuan. (v) Dalam berpartisipasi, perempuan terhambat oleh beberapa faktor.

Dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan, penulis menyarankan perlu mensosialisasikan pentingnya musrenbangkel; menempatkan perempuan kedalam semua posisi di musrenbangkel; memberikan dorongan, kepercayaan penuh dan motivasi kepada perempuan supaya memanfaatkan peluang dalam musrenbangkel; dan pelaksanaan musrenbangkel yang tidak menghambat perempuan.

ABSTRACT

ANGGITA PERMANA PUTRI, D0105036, Women's Participation In Participatory Development Planning (Qualitative Descriptive Studi Women's Participation In Development Planning Forum Kelurahan Laweyan Surakarta City Year 2009, Skripsi, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret University Surakarta, 2009.

This study aims to examine women's participation in development planning is reviewed from the aspect of participatory activities, access, control and benefits of participatory development planning for women and the factors that hinder women's participation in participatory development planning.

Research conducted in Kelurahan Laweyan District Laweyan Surakarta City area known as the "Kampung Batik Laweyan" and also as a region with a heterogeneous population characteristics. Form of qualitative research is descriptive. Data used comes from the primary data and secondary data. Data collection techniques used in the research was conducted through interviews with the parties related to women such as the present activities in participatory development planning, Kelurahan, LPMK administrator, the management of the management of RT and RW, and committee organizers of participatory development planning. In addition, another technique used is FGD (Focus Group Discussion), observations, and documentation. Technical analysis of the data used is descriptive analysis techniques and analysis of gender Harvard model. In this research the validity of data is done with the technique using data triangulasi some resources to ensure their accuracy.

From the results of the research show that: (i) The presence of women in musrenbangkel Laweyan not reach 30% quota for women nevertheless active in the forum. (ii) Access of women in the musrenbangkel laweyan through a commission hearing in the most sosio cultural commission. (iii) Women in the control musrenbangkel Laweyan still less because of the position of a women member. (iv) Musrenbangkel very useful for women to accommodate the aspirations, experiences, and needs of women. (v) In part, women hampered by several factors

In this research for resolving problems, the author suggest the importance musrenbangkel need to socialize, especially to women, placing women into all musrenbangkel commission; provide encouragement, belief in full, and that women's motivation to take advantage of opportunities in the musrenbangkel; and time musrenbangkel implementation that does not hamper women.

Keywords: Women, participation, development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan demokrasi menjadi titik sentral perubahan setelah jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998. Sejak saat itu, isu mengenai reformasi mulai digulirkan dan gerakan demokratisasi di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini. Pasca tumbanganya orde baru, demokrasi pancasila versi orde baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya yang memberikan harapan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya karena sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan rakyat maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat (Miftah, Thoha. 2008: 258).

Demokrasi dengan pemaknaan inti oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat menjabarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountability*), transparan (*transparency*), dan responsif (*responsibility*) terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan metode partisipatif merupakan konsekuensi logis dari tuntutan reformasi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat di era reformasi pasca orde baru.

Gagalnya metode pembangunan yang sentralistis di era orde baru disebabkan oleh adanya kekecewaan terhadap pelaksanaan paradigma sentralistis

yang dianggap terlalu mementingkan kedudukan pemerintah sebagai pusat perencana dan pelaksana pembangunan tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Paradigma pembangunan yang lebih mementingkan kekuasaan pemerintah tersebut tidak relevan lagi untuk diterapkan karena pemerintah tidak tahu apa sebenarnya kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin banyak dan semakin kompleks.

Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan akan bias dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat. Selain itu, menurut Alexander Abe (2002: 4), hilangnya partisipasi mengakibatkan mudarnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru silam.

Penggunaan metode partisipatif tepat digunakan dalam pembangunan karena dengan menggunakan metode partisipatif maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah. Dengan menerapkan metode partisipatif, masyarakat akan merasa bahwa dirinya adalah subjek pembangunan sehingga masyarakat akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial yang penuh terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu, metode pembangunan yang terlebih dahulu melakukan

penyerapan aspirasi dari target pembangunan yaitu masyarakat, nantinya akan sesuai dengan sasaran yang dituju sehingga tujuan semula dari pembangunan tidak salah sasaran.

Dalam menjawab tantangan perubahan dari masyarakat, ketika lingkungan eksternal mengalami perubahan sementara sistem terdahulu tidak dapat diandalkan untuk menjawab tantangan tersebut, maka salah satu cara penyelamatannya adalah menciptakan suatu sistem pengelolaan yang baik, yaitu suatu *good governance* (Budi, Winarno. 2008: 56). Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan ditopang elemen-elemen utama yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, yakni *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency, accountability*, dan *strategic vision* (Sedarmayanti. 2003: 7). Selain elemen-elemen tersebut, didalam *good governance* terdapat tiga stakeholders utama yang saling berinteraksi, yakni pemerintah (*state*), swasta (*privat sector*), dan masyarakat (*society*).

Munculnya isu *good governance* dalam pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah ataupun disisi warga. Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, tanggap, serta mampu menyusun kebijakan yang dapat menjamin hak-hak asasi dan keadilan sosial masing-masing warganya. Sejalan dengan harapan terhadap peran negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak

dan kewajibannya, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, dan tidak apatis.

Sebagai salah satu elemen *good governance*, kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan negara yang demokratis. Dalam proses demokrasi, partisipasi efektif antara perempuan dan laki-laki menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia (Drajat, Tri Kartono. 2008). Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi suatu keharusan karena masyarakat adalah pemilik kedaulatan dan karena masyarakat sebagai subjek pembangunan yang seharusnya terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan. Seperti yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2006:139) bahwa elemen masyarakat kritis yang terbentuk dalam berbagai organisasi independen dalam masyarakat memainkan peran strategis dalam melakukan kontrol terhadap birokrasi pemerintah daerah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membawa perubahan mendasar pada bentuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya *government (sentralistis)* kini bergeser menjadi *governance (desentralistis)* karena didalam UU tersebut tidak hanya membatasi pada hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja tetapi juga mengatur mekanisme

hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) untuk memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan di daerah maupun dalam pelaksanaannya (Syarif, Hidayat. 2000: 79).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah disemua daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (pasal 1 Ayat 6 UU No. 32 Tahun 2004). Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 silam diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI (UU No. 32 Tahun 2004). Dalam melaksanakan otonomi daerah dan dalam rangka menciptakan model pembangunan yang berpeluang efektif, maka pemerintah kota Surakarta berupaya mengubah berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya adalah dengan mengimplementasikan model perencanaan pembangunan yang demokratis dan berbasis pada partisipasi masyarakat yang disebut dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP) yang dilaksanakan mulai tahun 2001.

Di dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP) terdapat mekanisme partisipasi masyarakat yang merupakan saluran untuk mewadahi berbagai cara penyampaian aspirasi. Menurut Khairul Muluk (2007: 91), pada dasarnya terdapat dua kategori mekanisme masyarakat. *Pertama*, mekanisme partisipasi masyarakat yang diatur oleh penyelenggara pemerintahan daerah. *Kedua*, mekanisme yang tidak diatur oleh penyelenggara pemerintah daerah, namun berlangsung secara alamiah sebagai saluran partisipasi masyarakat yang dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri. Untuk mekanisme partisipasi masyarakat yang diatur oleh penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah Surakarta telah menerapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan landasan yuridisnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota merujuk Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/ M.PPN/ I/ 2005-050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Musrenbang dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya adalah

mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up* (dari bawah ke atas). Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa dana pembangunan pada hakekatnya berasal dari rakyat, maka dalam setiap pemanfaatannya harus melibatkan masyarakat termasuk perempuan dan harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Permasalahannya, apakah kesempatan ini juga direspon oleh masyarakat terutama perempuan dalam menyampaikan aspirasi, kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman mereka? Karena selama ini, representasi perempuan di arena pembuatan keputusan publik di segala tingkatan dinilai masih rendah.

Musrenbang sebagai wadah silaturahmi antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan *stakeholder* pembangunan lainnya untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang tumpang-tindih yang dapat mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat nasional, disebutkan didalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bahwa perempuan harus dipastikan ikut berpartisipasi. Bahkan, perwakilan perempuan harus dipastikan masuk ke dalam setiap pengiriman delegasi di tahapan Musrenbang yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasinya

perempuan di setiap Musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok, golongan baik itu laki-laki ataupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hetifah Sj Sumarto. (2004:4), bahwa:

“Sebagai negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi, muncul pertanyaan hubungan seperti apa yang akan dibangun antara warga dan pemerintah untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan *good governance*? Menginginkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang menekankan pentingnya membangun suatu proses pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan yang hierarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan andil seluruh *stakeholder*. *Stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi—perempuan dan laki-laki”.

Dengan diratifikasi dan diundangkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau CEDAW menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, maka sudah hampir 25 tahun perempuan di Indonesia memiliki perundang-undangan yang bersifat melindungi dan menjamin perempuan untuk ikut serta dalam menikmati manfaat dari pembangunan seperti yang tertulis di pasal 14 ayat (2) yaitu,” menjamin wanita untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat”. (Convention Watch. 2007: 21). Bahkan, salah satu target Tujuan Pembangunan

Millenium (*MDGs*) yang harus dicapai pada tahun 2015 diantaranya adalah menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki (Kompas. 2007: 35).

Menurut Yulius Slamet (1993: 12), berdasarkan pada cara keterlibatannya partisipasi dibedakan menjadi partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi, misal mengambil peranan didalam pertemuan-pertemuan, turut berdiskusi, dll. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan, kepada orang lain berikutnya dapat mewakilinya dalam kegiatan-kegiatan pada tingkatan yang lebih tinggi, sebagai contoh pemilihan wakil-wakil didalam DPR.

Untuk memantau tingkat partisipasi langsung perempuan di tingkat lokal Surakarta, data Musrenbangkot Surakarta dapat menjadi data yang cukup mewakilkan partisipasi langsung perempuan dalam perencanaan pembangunan. Musrenbangkot (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota) Surakarta yang merupakan forum musyawarah tahunan tertinggi di Kota Surakarta, pada tahun 2007 (dilihat dari tabel 1.1) menunjukkan data bahwa ditingkat lokal, jumlah partisipasi langsung perempuan masih terhitung dibawah 30%.

Tabel 1.1

Unsur Peserta Yang Mengikuti Musrenbangkot Surakarta Tahun 2007

No.	Unsur Peserta	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Delegasi Musrenbangcam	53	6	59
2.	Delegasi Forum SKPD	22	5	27

3.	SKPD di Lingk. Pemkot	49	35	84
4.	LSM	8	2	10
5.	Perguruan Tinggi	8	5	13
6.	Ormas dan Pemuda	7	-	7
7.	Sektor Informal	10	-	10
8.	Sektor Privat	12	3	15
9.	Tokoh Agama	3	-	3
10.	Budayawan	1	-	1
11.	Tokoh Masyarakat	-	2	2
12.	Organisasi Profesi	19	1	20
13.	Organisasi Perempuan	4	5	9
14.	Anggota DPRD Surakarta	19	1	20
15.	Perwakilan Partai Politik	6	2	8
16.	Lurah	45	7	52
17.	LPMK	36	2	38
	Jumlah	302	76	378
	Prosentase	79,9%	20,1%	100%

Sumber: Diolah dari data primer Bappeda, Pemkot Surakarta.

Dan apabila kita merunut tingkat partisipasi langsung perempuan di tingkat Musrenbang yang paling rendah yaitu tingkat kelurahan (Kelurahan Laweyan), dapat dilihat bahwa angka partisipasi langsung perempuan di dalam Musrenbangkel tidak jauh berbeda dengan angka partisipasi langsung perempuan

di Musrenbangkot Surakarta yang mana angkanya masih dibawah prosentase 30%. Seperti yang tercantum pada data dibawah ini:

Tabel 1.2

Unsur Peserta Yang Mengikuti Musrenbangkel Laweyan Tahun 2007

No.	Elemen Peserta	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sektor Privat	9	-	9
2.	Tokoh Masyarakat	2	-	2
3.	Karang Taruna	2	-	2
4.	LPMK	1	1	2
5.	Kelurahan	5	1	6
6.	RT	11	1	12
7.	RW (PKK)	1	3	4
8.	Organisasi Sosial	1	1	2
	Jumlah	32	7	39
	Prosentase	82 %	18 %	100 %

Sumber : Diolah dari data primer Kelurahan Laweyan.

Didalam petunjuk teknis pelaksanaan baik musrenbangkel, musrenbangcam, ataupun musrenbangkot telah disebutkan bahwa keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% dari jumlah keseluruhan peserta. Namun, apabila kita melihat prosentase dari kedua tabel diatas, peserta laki-laki dan perempuan didalam musrenbangkot Surakarta dan musrenbangkel Laweyan terlihat adanya ketimpangan yang besar antara laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk prosentase minimal 30% seperti yang tertulis didalam peraturan formalnya

pun tidak terpenuhi. Dikutip dari <http://konsorsiumsolo.multiply.com/> Jun 13, '08, dari data dokumentasi IPGI (Indonesian Partnership on local Governance Initiative) Solo, diperoleh gambaran bahwa partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah, hanya berkisar 10 persen dari jumlah peserta di masing-masing kelurahan. Hal ini akan berpengaruh pada proses pembangunan karena keterlibatan unsur-unsur masyarakat tersebut akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan yang nantinya manfaat pembangunan itu sendiri akan dinikmati oleh semua unsur-unsur masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mubyarto (1983:12) bahwa hakikat pembangunan terbagi dalam tiga penyertaan yaitu pembangunan: 1) harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan batiniah, 2) harus merata diseluruh tanah air, dan 3) bukan untuk satu golongan atau sebagian anggota masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat dan rakyat.

Salah satu permasalahan utama dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran perempuan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Perempuan mempunyai peranan yang strategis dalam mengaspirasikan kepentingannya melalui forum musyawarah kelurahan ini. Banyak kepentingan yang harus diperjuangkan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan seperti pendidikan, kesehatan serta masih banyak lagi aspek kepentingan perempuan yang selama ini belum terakomodir dalam program perencanaan pada tingkat kelurahan. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi langsung perempuan di dalam Musrenbangkel Laweyan,

Kota Surakarta Tahun 2009 yang dirumuskan sebagai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis hendak mengkaji penelitian deskriptif kualitatif mengenai “Bagaimana partisipasi langsung perempuan di dalam Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta Tahun 2009?” yang ditinjau dari:

- Profil aktivitas perempuan di Laweyan dalam Musrenbangkel,
- Profil akses perempuan di Laweyan dalam Musrenbangkel,
- Profil kontrol perempuan di Laweyan dalam Musrenbangkel, dan
- Manfaat Musrenbangkel bagi perempuan di Kelurahan Laweyan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional

Untuk meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif yang mencakup bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif ditinjau dari aspek aktivitas, akses, kontrol perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, serta manfaatnya bagi perempuan. Dan juga akan meneliti faktor-faktor apa yang menghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

2. Tujuan Fungsional

Untuk memberikan informasi, masukan, dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penerapan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Surakarta yang lebih meningkatkan kualitas partisipasi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai gambaran dan sekaligus informasi kepada Pemerintah Kota Surakarta apakah perencanaan pembangunan yang digunakan sudah memenuhi koridor partisipatif ataukah belum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang juga merupakan unsur masyarakat dalam pembangunan.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2. Kajian Tentang Gender

Dari hal-hal tersebut diatas, masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian pembangunan. Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna (Abe. 2002: 16). Dalam pandangan Adisasmita (2006: 19), pembangunan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip, yaitu: 1) Transparansi, 2) partisipatif, 3) dapat dinikmati masyarakat, 4) dapat dipertanggungjawabkan, dan 5) berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh daerah dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat, oleh karena itu masyarakat seharusnya dilibatkan untuk menentukan visi pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

Sondang P. Siagian (2003: 4) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Ada beberapa ide pokok yang perlu mendapat perhatian: 1) pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri; 2) pembangunan sebagai suatu usaha yang secara sadar dilakukan; 3) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan; 4) pembangunan mengarah kepada modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam

lingkungan; 5) pembangunan itu bersifat multidimensi, ini mencakup aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, kultural, dan administrasi; 6) semua hal yang telah disebutkan diatas ditujukan pada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus-menerus harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian. 2003: 5).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka menyusun langkah-langkah untuk memastikan pencapaian tujuan yang akan dicapai, perencanaan merupakan langkah awal dari usaha dalam proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat secara lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alexander Abe bahwa perencanaan sebagai bagian dari instrumen pembangunan, bagian dari upaya untuk mengubah kondisi dan posisi hidup masyarakat, guna mencapai situasi yang lebih baik dan bermakna (Abe, 2002: 44).

Mengenai pengertian perencanaan, merujuk pada pendapat Abe (2002: 24), perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut, Abe menguraikan beberapa komponen penting dari perencanaan, yakni

tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan dapat dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Sedangkan menurut Waterston seperti dikutip Conyers (1994: 4), disebutkan bahwa pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan lengkap Bintoro Tjokroamidjojo (1984: 12) mengemukakan pengertian perencanaan sebagai berikut:

“Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia”.

”Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.”

”Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa”.

Berikutnya untuk mengartikan pengertian perencanaan pembangunan, penulis mengutip definisi yang dikemukakan oleh Albert Waterston dalam Khairuddin (1992: 47) berikut ini:

“Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk

mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

”Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif”.

Sedangkan berdasar pada Surat Keputusan Walikota Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2001, perencanaan pembangunan dimaknai sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dipilih secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat, serta penentuan pilihan secara alternatif yang rasional guna pencapaian tujuan tersebut sesuai sumber daya yang ada dan berdasarkan ukuran tertentu yang dipilih sebelumnya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses pemilihan alternatif mengenai apa yang akan dilakukan berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber pembangunan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan keadaan sosial dan ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan perencanaan perlu melibatkan rakyat dalam perencanaan. Tanpa partisipasi rakyat, maka jalannya pembangunan tidak akan berhasil karena apa yang diputuskan tidak mewakili kepentingan rakyat. Renee A. Irvin and John Stansbury (Volume 1 Issue I 2007: 2) menuliskan:

“...With citizen participation, formulated policies might be more realistically grounded in citizen preferences, the public might become more sympathetic evaluators of the tough decisions that government administrators have to make, and the improved support from the public might create a less divisive, combative populace to govern and regulate...”

“...Dengan partisipasi warga, rumusan kebijakan mungkin lebih realistis mendasar pada pilihan warga, publik menjadi evaluator yang lebih simpatik pada keputusan yang harus dibuat oleh pemerintah. Dan dukungan yang luas dari publik mengurangi perpecahan, perlawanan rakyat pada pemerintah dan peraturan...”

Margono Slamet dalam Suminah dkk (2002: 86) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Ditambahkan juga, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud apabila terpenuhinya tiga faktor yang mendukung yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan adalah aspek emosi dan perasaan terhadap suatu obyek tertentu yang berupa kecenderungan reaksi psikis yang timbul dari dalam diri manusia yang dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan obyek tertentu. Kemampuan adalah kesanggupan seseorang untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan karena memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. Sedangkan kesempatan adalah peluang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Sedangkan Adisasmita (2006: 41) mengemukakan partisipasi masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Definisi partisipasi juga dikemukakan oleh Loekman (1995: 222), partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil yang dicapai. Menurut definisi ini, maka ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek pembangunan.

Sedangkan pengertian partisipasi menurut Hetifah Sj Sumarto (2003: 128) adalah: "partisipasi sebagai keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya". Disamping itu, merujuk pada pendapat Tjokroawinoto (1999), partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran, dan perasaan bagi terciptanya tujuan bersama-sama bertanggungjawab terhadap tujuan tertentu.

Dari berbagai definisi tentang partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental, emosi, dan fisik seseorang atau kelompok masyarakat dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan, dan disertai tanggungjawab dengan kemandirian sebagai hakikat partisipasi. Artinya, kegiatan partisipasi haruslah berasal dari diri sendiri, apabila seorang individu melakukan karena didorong atau digerakkan oleh orang lain atau dia merasa khawatir akan konsekuensi tertentu apabila tidak melaksanakan kegiatan “partisipasi”, maka yang sebenarnya terjadi bukanlah partisipasi melainkan mobilisasi atau partisipasi yang digerakkan dari atas.

Di dalam *good governance*, terdapat tiga *stakeholders* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (Sumarto, 2003: 29). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mempunyai sifat yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Diana Conyers (1994: 154) bahwa:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk proyek dan akan mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan hal ini sentral dengan konsep *man centered development* suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia jenis pembangunan akan diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan.

Apabila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Abe. 2002: 16).

Dalam proses pembangunan, fungsi yang dalam urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang cukup penting dalam seluruh kegiatan pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, perencanaan yang berbasis pada prakarsa masyarakat harus diupayakan.

Perencanaan partisipatif merupakan usaha sistematis yang dapat dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan pada kebutuhan warga masyarakat dan berkembangnya kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah secara mandiri.

Perencanaan partisipatif menurut Abe merupakan perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya, benar-benar melibatkan masyarakat (2002: 71). Sama halnya dengan pernyataan Abe, Agus Dody S. menyatakan bahwa definisi perencanaan pembangunan partisipatif sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan” (2003: 104).

Adisasmita (2006: 47) mengatakan bahwa garis besar perencanaan partisipatif meliputi lima tahapan, yaitu mulai dari (1) analisis masalah dan penentuan prioritas masalah; (2) analisis potensi dan kendala yang dihadapi; (3) analisis kepentingan atau kebutuhan kelompok strategis dalam masyarakat; (4) perumusan rencana program pembangunan swadaya masyarakat; dan (5) lokakarya membicarakan implikasi program.

Peranan perencanaan partisipatif sangat penting. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dan mengidentifikasi program pembangunan daerah sesuai kebutuhan daerah, potensi, dan

keinginan kelompok masyarakat. Sehingga perencanaan partisipatif benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas, dan dianggap layak dipercaya untuk dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, perencanaan pembangunan partisipatif pada intinya merupakan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung ataupun tidak langsung). Yang dimaksud dengan melibatkan kepentingan rakyat adalah apabila rakyat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar (Abe. 2002: 91). Kalau masyarakat sendiri berpartisipasi yaitu melaksanakan proses perencanaan partisipatif, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan atas kemauan masyarakat sendiri yang menjadi satu faktor berpengaruh dalam minat dan kesuksesan pelaksanaannya.

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, proses perencanaan pembangunan partisipatif di kota Surakarta dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel), musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), dan musyawarah perencanaan pembangunan kota (Musrenbangkot). Agus (2003: 34)

menjelaskan bahwa Musrenbangkel merupakan forum masyarakat, multi *stakeholders*, dan pemerintah kelurahan untuk melakukan kegiatan perencanaan pembangunan secara demokratis, berbasis pada masyarakat tingkat kelurahan.

Untuk tingkat kelurahan, musrenbang dilaksanakan pada bulan Januari, musyawarah tersebut diadakan untuk menyiapkan skala-skala prioritas perencanaan pembangunan kelurahan untuk tahun itu juga. Proses ini merupakan cerminan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan, sifatnya mengikat semua pihak dalam pembangunan. Tujuan pelaksanaan Musrenbangkel adalah menyusun dan menetapkan daftar skala prioritas pembangunan tahunan ditingkat kelurahan yang dibiayai secara swadaya. Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan yang bersumber dari APBD maupun sumber dana lainnya diajukan serta dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Dalam Musrenbangkel, pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator, sementara motor penggerak kegiatan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti pengurus LPMK, pemerintah kelurahan, pengurus RT/RW, perwakilan organisasi pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, dan sektor privat misalnya pengusaha, investor, pedagang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, mekanisme Musrenbangkel dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap Pra Musrenbangkel I, Pra Musrenbangkel II, dan Musrenbangkel.

1. Pra Musrenbangkel I

Dalam Pra Musrenbangkel I dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1.1 Pembentukan panitia Musrenbangkel (*Steering Commiittee* dan *Organizing Commiittee*)
- 1.2 Dalam Pra Musrenbangkel I dilakukan kegiatan:
 - 1.2.1 Menyusun konsep tata tertib Musrenbangkel;
 - 1.2.2 Menyusun mekanisme sosialisasi dan jadwal musyawarah RT/RW;
 - 1.2.3 Menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel;
 - 1.2.4 Menyusun anggaran Musrenbangkel;
 - 1.2.5 Membagi tugas panitia Musrenbangkel;
 - 1.2.6 Mengumpulkan DSP dari RT/RW dan kelompok masyarakat;
 - 1.2.7 Prioritas dari RT/RW dan kelompok masyarakat sebanyak-banyaknya 5 (lima);
 - 1.2.8 Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- 1.3 Hasil keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel I adalah bahan Pra Musrenbangkel II (*draft* Form IV A dan Form IV B)

2. Pra Musrenbangkel II

2.1 Pra Musrenbangkel II dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangkel dibantu fasilitator kelurahan.

2.2 Pra Musrenbangkel II diikuti oleh seluruh panitia Musrenbangkel ditambah *stakeholders* kelurahan (tokoh masyarakat, wakil sektor informal, dll).

2.3 Dalam Pra Musrenbangkel II dilaksanakan kegiatan:

- Analisis potensi Kelurahan;
- Klarifikasi bahan Musrenbangkel (draf bahan Musrenbangkel I dan usulan baru dari RT/RW;
- Penetapan DSP per fungsi;
- Penetapan sasaran pembangunan tahunan Kelurahan;
- Penyusunan draf DSP Musrenbangkel yang terdiri dari:
 - Prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan yang akan didanai oleh Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (Block Grant) dan atau swadaya masyarakat;
 - Prioritas Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD.

2.4 Hasil keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel II adalah draf DSP Musrenbangkel (draf Form IV A dan Form IV B).

3. Musrenbangkel

3.1 Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara

3.2 Penyelenggaraan Musrenbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.

3.3 Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi:

3.3.1 Sidang Pleno I

Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan:

- Pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh *Steering Committee*;
- Pengesahan tata tertib;
- Paparan prioritas program atau kegiatan pembangunan di kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Camat atau pemerintah Kecamatan;
- Paparan prioritas program atau kegiatan kelurahan tahun berikutnya beserta informasi perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (*Block Grant*) oleh Lurah;
- Paparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan masyarakat (misalnya Ketua RW, Komite Sekolah, Ketua Kelompok Usaha, dll);
- Penetapan tata cara penyeleksian prioritas kegiatan.

3.3.2 Sidang Komisi

Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan:

Penyusunan, validasi dan rekapitulasi prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah:

- 1) yang akan didanai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (*Block Grant*) dan atau Swadaya Masyarakat;
- 2) yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.

3.3.3 Sidang Pleno II

Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan:

- Paparan hasil sidang komisi;
- Tanggapan;
- Pengesahan hasil sidang pleno II;
- Pembentukan Tim Penyempurnaan Perumusan;
- Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri dari:
 - Panitia Penyelenggara (SC/ OC);
 - Perwakilan Sidang Komisi.
- Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab;
- Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang prosesnya dipimpin oleh Penanggung Jawab;

- Penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbangkel diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi.

b. Kajian Tentang Gender

Untuk mengkaji gender lebih jauh sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian gender. Gender adalah suatu istilah yang tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Menurut Markhamah (2003: 112), gender adalah seperangkat peran yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang disosialisasikan melalui proses sosial budaya yang berkaitan dengan harapan dan pikiran masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Trisakti (2008: 5), gender adalah konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan pembangunan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, memberikan pengertian gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tercapai keadilan gender. Dan yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan gender seperti:

- a. Dirugikan,
- b. Dibedakan derajat,
- c. Dianggap tidak mampu,
- d. Diperlakukan lebih rendah

Karena penilaian-penilaian berat sebelah akibat faktor jenis kelamin (Ismi. P3G LPPM. 18 Februari 2009).

Pembahasan mengenai gender dikenal adanya dua teori yaitu teori *nurture* dan teori *nature* (Arief, Budiman. 1985: 2). Menurut teori *nurture* perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan perannya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut teori *nature*, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tugas yang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga dalam pembangunan baik itu dalam prosesnya maupun manfaatnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran

perempuan dalam pembangunan melalui landasan yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memasukkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuan dari PUG yang merupakan komitmen nasional maupun internasional ini adalah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga antara perempuan dengan laki-laki sama-sama mempunyai akses untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Menurut UNESCO seperti yang dikutip oleh Ismi, Dwi Astuti (2008: 25), definisi kesetaraan gender dan keadilan gender adalah sebagai berikut:

”Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama tetapi hak dan tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan”.

”Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan, dan kesempatannya”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah, kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender yaitu suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan baik didalam maupun diluar rumah tangga.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka pemerintah mengupayakan pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam rangka kesejahteraan perempuan. Berikut ini adalah berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut (Trisakti. 2008: 37) :

1. Pendekatan WID (*Women In Development*)

Tahun 1970 muncul konsep *Women in Development (WID)*, yang merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menawarkan startegi pembangunan yang

meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan sebagai beban pembangunan. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan, memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga, mengintergrasikan perempuan dalam proyek, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesehatan, pendapatan atau sumber daya. Pendekatan WID berpijak dari dua sasaran, yaitu:

- a. Pentingnya prinsip egalitarian, oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar.
- b. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh para perempuan disektor produksi . Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa peran-peran produktif hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki sedangkan perempuan kurang dilibatkan karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik bukan produktif.

Upaya ini memang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan namun dalam strategi WID ini konsep kesetaraan gender belum secara menonjol diadopsi dan gerakan belum diarahkan terhadap struktur dan kultur sosial yang bias gender.

2. Pendekatan WAD (*Women And Development*)

Tahun 1980 muncul konsep *Women and Development (WAD)*, konsep ini menggantikan WID karena dalam pendekatan WID

menekankan terintegrasiannya perempuan dalam pembangunan, maka dalam WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi setelah WID terimplementasi kemudian beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan. Dalam WAD, tidak membahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan karena sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan, dan peran yang sejajar.

Implementasi pendekatan WAD dititikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada diluar tugas dan tanggungjawab unsur domestik. Kegiatan domestik berada di luar jalur yang sebelumnya perempuan sebagai obyek kali ini perempuan menjadi subyek dalam pembangunan. Namun, kesalahan konsep WAD ini adalah tidak memasukkan unsur laki-laki nya.

3. Pendekatan GAD (*Gender And Development*)

Tahun 1990 dikembangkan konsep *Gender and Development (GAD)*, konsep ini menggabungkan unsur laki-laki dan perempuan didalam pembangunan. Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itu, pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan

perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana apabila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif.

Dengan demikian kajian tentang gender didalam pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan karena di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga dalam pembangunan baik itu dalam prosesnya maupun manfaatnya. Sehingga akan tercipta kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi hal penting karena dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga antara perempuan dengan laki-laki sama-sama mempunyai akses untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Seperti yang ditambahkan oleh Mishra Panda (Gender, Technology and Development 11 (3), 2007: 2) bahwa:

“...Gender mainstreaming is strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and program in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality...”

“...Pola pikir gender adalah strategi untuk membuat perempuan sama baiknya dengan kepentingan dan pengalaman laki-laki yang terintegrasikan pada desain, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dan ketidakadilan tidak akan abadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai persamaan gender...”

F. Kerangka Berpikir

Sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender, perlu dilakukan analisis gender. Analisis gender merupakan alat analisis untuk memahami realitas sosial. Disamping itu analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil (Trisakti. 2008: 3).

Analisis gender dimulai dengan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data terpilah antara laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalah secara tepat. Mengenai pengertian analisis gender, merujuk pada pendapat Ismi, Dwi Astuti (2008: 22), analisis gender adalah proses mengurai data dan informasi secara sistematis tentang kedudukan, fungsi, peran, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yaitu Musrenbangkel, penulis menggunakan teknik analisis responsif gender model harvard. Teknik ini sering disebut *Gender Framework Analysis (GFA)* yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interelasi satu sama lain yaitu profil aktivitas, profil akses dan profil kontrol manfaat. Teknik analisis harvard dimulai dengan mengumpulkan data pada tingkat mikro yaitu masyarakat dan rumah tangga.

Kerangka analisis harvard sangat luwes sehingga mudah untuk diadaptasikan.

Dibawah ini adalah kerangka analisis harvard, yaitu:

1. Profil aktivitas

Yang berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, didalam rumah tangga dan masyarakat), yang memuat daftar tugas perempuan dan laki-laki (laki-laki melakukan apa?, perempuan melakukan apa?, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan menurut umur, etnis, kelas sosial tertentu, dimana dan kapan tugastugas tersebut dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu produktif, reproduktif (rumah tangga), dan sosial-politik-keagamaan.

2. Profil akses

Siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya produktif yang memuat daftar pertanyaan perempuan mempunyai atau bisa memperoleh sumber daya apa? Lelaki memperoleh apa? Perempuan menikmati apa? Lelaki menikmati apa?

3. Profil kontrol

Perempuan mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumber daya apa? Lelaki penentu sumber daya apa? Sumber daya disini adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari melakukan aktivitas. Sumber daya dapat berupa materi (bernilai ekonomi, politis, sosial, dan waktu), akses terhadap sumber daya dan manfaat, kontrol atas sumber

daya dan manfaat dikelompokkan menurut gender, faktor-faktor yang berpengaruh menyangkut hal-hal yang mengakibatkan pada adanya pembagian kerja, adanya profil akses dan kontrol suatu masyarakat tersebut (Trisakti. 2008: 160).

Teknik analisis ini dirancang sebagai landasan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial. Analisis model harvard ini dimaksudkan untuk:

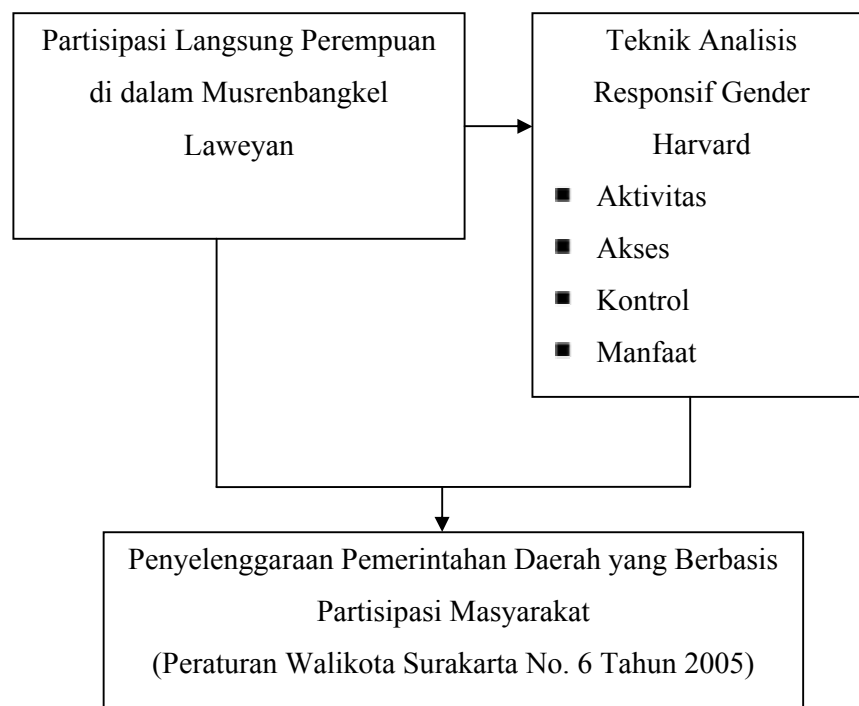
- a. Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
- b. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
- c. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan (Trisakti. 2008: 161)

Dengan menggunakan teknik analisis ini, elemen-elemen khusus dalam teknik analisis gender akan memberikan kemudahan penulis untuk melakukan penelitian partisipasi perempuan dalam musrenbangkel, karena:

- a. Adanya elemen perbedaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dalam kaitannya dengan tanggungjawab laki-laki dan perempuan.
- b. Adanya perbedaan antara akses terhadap sumber daya dan manfaat dengan kontrol atas sumber daya dan manfaat.
- c. Adanya pandangan yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan sumberdaya yaitu tidak hanya sumberdaya yang bersifat material tetapi juga yang susah dinilai secara ekonomi seperti ketrampilan dan organisasi sosial

dan yang paling penting terutama untuk perempuan yaitu sumberdaya dan manfaat yang berupa waktu.

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif melalui mekanisme Musrenbangkel Laweyan tahun 2009 dapat diketahui seberapa besar partisipasi langsung dari perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan yang saat ini relatif rendah dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta No. 6 Tahun 2005. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dalam bagan kerangka berpikir.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi (Adi. 2004: 58). Sedangkan Sutopo mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Sedangkan sifat dari penelitian deskriptif (Vredenburg 1984 dalam Setyawati dan Tangkilisan, tanpa tahun: 128) adalah merupakan studi kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam suatu obyek tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual yaitu partisipasi perempuan pada perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengambil obyek penelitian salah satu masyarakat di kota Surakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagai representasi dari wilayah dengan karakteristik penduduk yang sangat heterogen baik dari tingkat pendidikannya, status ekonominya, dan jenis mata pencaharian penduduknya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari keterangan langsung informan yang ditunjuk oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan sumber (*key informan*) perempuan yang pernah diundang dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, aparat kelurahan, pengurus LPMK, pengurus RT, pengurus RW, dan panitia penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dimanfaatkan oleh peneliti yang berupa dokumen-dokumen yang dicatat oleh institusi, laporan-laporan dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel yang diambil bersifat selektif karena didasarkan pada berbagai pertimbangan supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, untuk menentukan informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan musrenbangkel Laweyan kota Surakarta tahun 2009.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna mendukung ini, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab kepada narasumber (*key informan*). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar responden mengetahui maksud dari materi yang dipertanyakan, untuk itu instrumen yang dipergunakan adalah berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi penulis dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi responden untuk menyampaikan pendapatnya. Disamping itu juga dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) sebagai upaya untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan terfokus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengutip data yang tersedia dari sumber data. Disamping itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Seperti dengan mempelajari peraturan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Dan juga mencermati susunan panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel) Laweyan.

c. Teknik Observasi

Pengumpulan teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap proses, kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel) Laweyan.

6. Validitas Data

Agar data yang disajikan dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, maka perlu dilakukan validitas data. Dalam penelitian ini, validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Lebih lanjut Patton (1984) dalam H.B Sutopo (2002: 78) menjelaskan bahwa ada empat macam triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi data, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama
- b. Triangulasi investigator, yaitu mengumpulkan data yang semacam dilakukan oleh beberapa orang peneliti

- c. Trianggulasi metodologi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data yang sejenis tapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d. Trianggulasi teoritik, yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif realitas yang berbeda.

Dalam penelitian ini, teknik trianggulasi yang dipakai adalah trianggulasi data dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama guna mendapatkan kebenaran data.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini pada prinsipnya menggunakan metode kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 3) akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau institusi yang diamati. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai partisipasi langsung perempuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender model Harvard dengan kategori profil aktivitas, akses kontrol, dan manfaat.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Wilayah kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut, dengan perbatasan:

Sebelah utara : Kabupaten Boyolali
 Sebelah selatan : Kabupaten Sukoharjo
 Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar
 Sebelah barat : Kabupaten Sukoharjo

Suhu udara rata-rata di kota Surakarta berkisar antara $24,8^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $28,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan kelembaban udaranya berkisar antara 66 % sampai dengan 84 %. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 24. Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 595 mm jatuh pada bulan Februari. Sementara itu rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar jatuh pada bulan Oktober sebesar 31.6 mm per hari hujan.

Luas wilayah kota Surakarta mencapai $44,06\text{ km}^2$ yang terbagi dalam 5 kecamatan (kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari), 51 kelurahan. Di Surakarta Dalam Angka Tahun 2007, jumlah RW tercatat

sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.669. Dengan jumlah angka KK sebesar 130.440 KK maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar 49 KK setiap RT. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 61,68 %. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu berkisar antara 20% dari luas lahan yang ada.

B. Deskripsi Kelurahan Laweyan

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Laweyan adalah salah satu kelurahan dari 11 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Laweyan, kota Surakarta. Kelurahan Laweyan lebih dikenal dengan “Kampung Batik Laweyan” yang merupakan sebuah kampung dagang dan pusat industri batik yang dimulai perkembangannya sejak awal abad 20. Wilayah kelurahan Laweyan berada di sebelah barat kota Surakarta. Jarak wilayah kelurahan Laweyan dengan pusat pemerintahan kecamatan Laweyan adalah $\pm 0,5$ km dan untuk jarak wilayah kelurahan Laweyan dengan pusat pemerintahan kota Surakarta sejauh ± 4 km. Batas-batas kelurahan Laweyan dengan wilayah daerah lain secara administratif yaitu:

Sebelah utara	: Kelurahan Sondakan
Sebelah selatan	: Kabupaten Sukoharjo
Sebelah timur	: Kelurahan Bumi
Sebelah barat	: Kelurahan Pajang

Dengan luas wilayah yang mencapai 24,83 ha, secara administratif kelurahan Laweyan terdiri dari 3 Rukun Warga (RW), dan 10 Rukun Tetangga (RT). Dibawah ini adalah perincian luas wilayah kelurahan Laweyan:

■ Luas pemukiman	: 22,28 ha
■ Luas kuburan	: 2,5 ha
■ Luas taman	: 0,006 ha
■ Luas perkantoran	: 0,007 ha
■ Luas prasarana umum lainnya	: 0,005 ha

Untuk lebih memahami lokasi penelitian, akan dilampirkan peta wilayah kelurahan Laweyan pada gambar 1.1 (hal. 48).

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Laweyan

Struktur organisasi pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang garis koordinasi ataupun garis komando dalam melaksanakan suatu pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kelurahan Kota Surakarta, susunan organisasi kelurahan di Kota Surakarta mencakup:

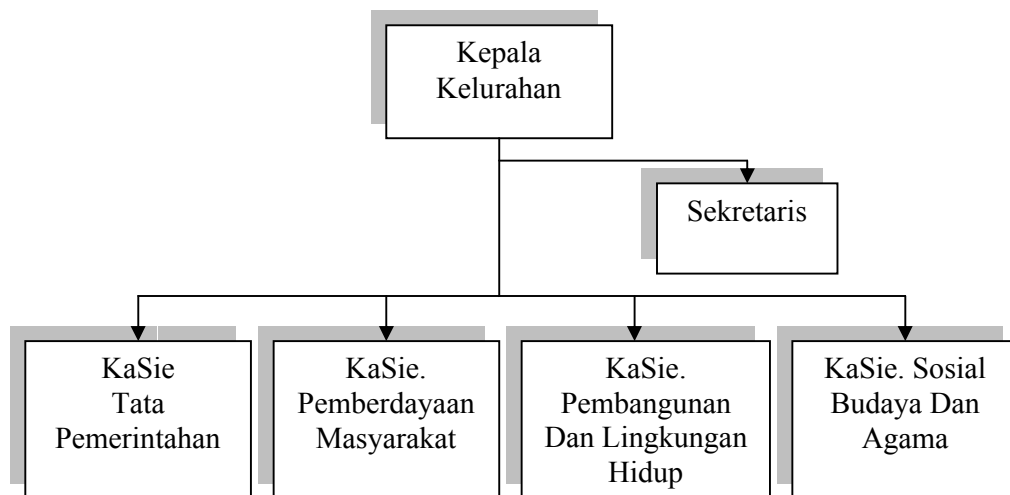
- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- e. Seksi Perekonomian dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Seksi Sosial dan Budaya

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelurahan Laweyan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan (Lurah). Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur dan mengendalikan semua jalannya kegiatan pemerintahan, kepala kelurahan dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan di Kelurahan Laweyan terdiri dari sekretaris dan empat Sie yaitu Sie Tata Pemerintahan, Sie Pemberdayaan Masyarakat, Sie Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Sie Sosial, Budaya, dan Agama. Untuk kegiatan Musrenbangkel yang diadakan setiap tahunnya ini berada dalam ampuan Sie Pembangunan Dan Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1.1

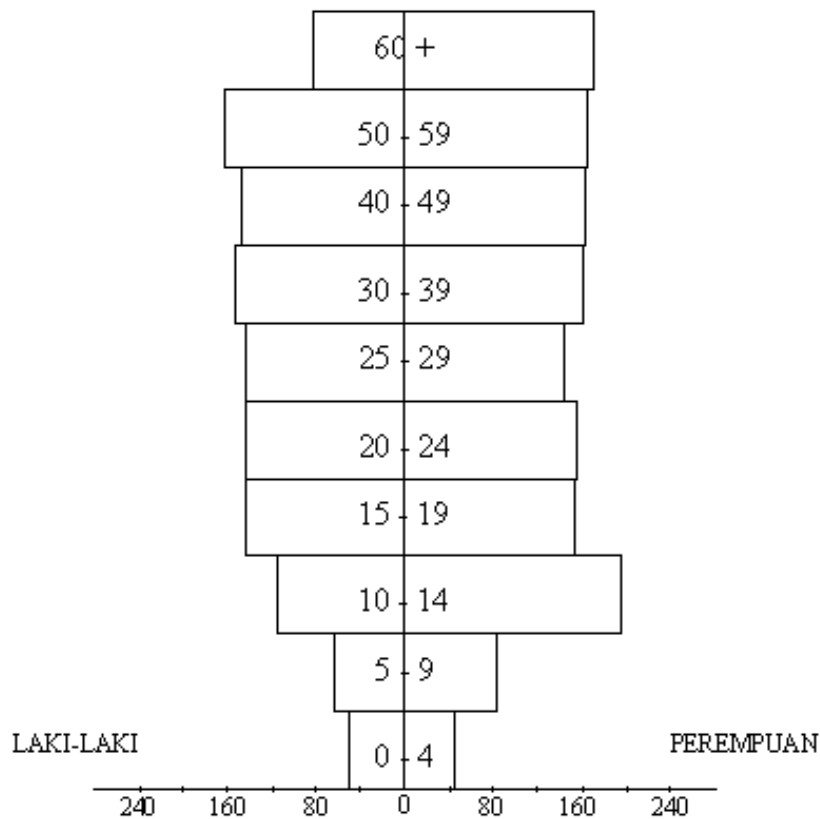
Struktur Organisasi Kelurahan Laweyan



3. Potensi Penduduk

2.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kelurahan Laweyan berjumlah 2.568 jiwa dengan jumlah 511 kepala keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah perempuan jauh lebih banyak yaitu 1.364 jiwa sedangkan jumlah laki-laknya adalah 1.204 jiwa. Keadaan penduduk wilayah kelurahan Laweyan dalam kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar piramida dibawah ini.



Sumber: Data Monografi Kelurahan Laweyan, Desember 2008

Gambar 1.2

Piramida Penduduk Kelurahan Laweyan

Secara garis besar komposisi penduduk menurut usia dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Usia 0-14 tahun sebagai kategori usia belum produktif
- b. Usia 15-59 tahun sebagai kategori usia produktif
- c. Usia 60+ sebagai kategori tidak produktif

Sesuai dengan piramida diatas, sebanyak 326 jiwa (12,7%) dari jumlah keseluruhan 2.568 jiwa penduduk kelurahan Laweyan adalah usia dewasa yaitu penduduk dengan usia (50-59), usia tersebut merupakan jumlah penduduk yang paling besar. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk usia muda (0-4) yaitu 95 jiwa (3,7%). Berdasarkan perbandingan usia belum produktif, produktif, dan tidak produktif diketahui bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Laweyan termasuk kategori usia produktif yaitu 1.832 jiwa (71,4%). Dan untuk penduduk usia belum produktif adalah 546 jiwa (21,3%) yang merupakan kategori usia yang paling sedikit di kelurahan Laweyan. Sedangkan untuk kategori usia tidak produktif sebesar 252 jiwa (9,8%). Dari jumlah keseluruhan penduduk Laweyan, angkatan kerja yang tersedia adalah 1.832 jiwa sehingga dengan usia penduduk produktif memungkinkan penduduknya untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di Laweyan.

2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Dari sekian jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Laweyan yaitu 2.568 jiwa, hanya sebagian penduduk yang memiliki mata pencarian yaitu sebesar 1.671 jiwa. Mata pencarian penduduk terdiri dari pengusaha, buruh

industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, pegawai negeri dan pensiunan. Ada juga penduduk kelurahan Laweyan yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, masih menganggur, dan masih sekolah. Untuk mengetahui jumlah rinci dari jenis mata pencaharian terutama mereka yang berada di usia 10 tahun keatas, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pengusaha	60	3,6%
2.	Buruh Industri	200	11,97%
3.	Buruh Bangunan	150	8,98%
4.	Pedagang	27	1,62%
5.	Pengangkutan	75	4,49%
6.	Peg. Negeri (Sipil/ABRI)	20	1,19%
7.	Pensiunan	28	1,68%
8.	Lain-lain	1111	66,49%
Jumlah		1671	100%

Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Laweyan, Desember 2008

Dari laporan monografi Kelurahan Laweyan bulan Desember 2008, bahwa sebagian besar masyarakat kelurahan Laweyan mempunyai mata pencaharian lain-lain yaitu sebanyak 1.111 jiwa dari seluruh penduduk yang berkerja. Jumlah minoritas penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri (sipil/ ABRI) sebesar 20 jiwa (1,19%).

2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dibatasi pada penduduk yang berusia 5 tahun keatas. Jumlah penduduk Kelurahan Laweyan menurut

tingkat pendidikan nya adalah 2.328 jiwa. Jenis pendidikan nya terdiri dari tamat Akademi atau Perguruan Tinggi, tamat SLTA, tamat SLTP, tamat SD, tamat belum tamat SD, dan tidak sekolah. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk kelurahan Laweyan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tamat Akademi/ PT	385	16,54%
2.	Tamat SLTA	406	17,44%
3.	Tamat SLTP	435	18,69%
4.	Tamat SD	443	19,03%
5.	Tidak Tamat SD	277	11,89%
6.	Belum Tamat SD	283	12,16%
7.	Tidak Sekolah	99	4,25%
Jumlah		2.328	100%

Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Laweyan, Desember 2008

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk kelurahan Laweyan adalah sedang karena perbandingan antara penduduk yang berpendidikan menengah dan tinggi dengan yang berpendidikan rendah hampir sama. Jumlah penduduk yang termasuk tingkat pendidikan rendah adalah 1.102 jiwa (47,33%) terdiri dari tamat SD sebesar 443 jiwa (19,03%), belum tamat SD 283 jiwa (12,16%), tidak tamat SD 277 jiwa (11,89%), dan tidak sekolah sebesar 99 jiwa (4,25%).

Jumlah penduduk yang termasuk dalam tingkat pendidikan sedang adalah 841 jiwa (36,13%) yang terdiri dari tamat SLTP 435 jiwa (18,69%) dan

tamat SLTA 406 jiwa (17,44%). Dan untuk penduduk yang termasuk tingkat pendidikan tinggi sebesar 385 jiwa (16,54%). Dari tabel diatas mayoritas adalah tamatan SD. Tingkat pendidikan sebatas tamat SD sebagian besar dimiliki oleh penduduk yang berusia lanjut karena sikap orang tua-tua di Laweyan tentang pendidikan formal adalah acuh tidak acuh sehingga jarang sekali yang memikirkan pendidikan sekolah anak-anaknya. Pada umumnya, mereka masih tetap mempertahankan pandangannya bahwa pekerjaan sebagai pedagang dan pengusaha adalah lebih mulia dibandingkan dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri yang umumnya dihasilkan dari dunia pendidikan. Orang tua lebih memberikan pendidikan informal seperti menguasai management produksi, management pemasaran, dan membangun jaringan dagang (Soedarmono. 2006: 98).

2.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk kelurahan Laweyan mayoritas memeluk agama islam yaitu sebesar 93,66%. Dan yang paling sedikit jumlahnya adalah pemeluk agama hindu sebesar 0,12%. Jumlah pemeluk agama di kelurahan Laweyan, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Banyaknya Pemeluk Agama

No.	Pemeluk Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	2407	93,66%
2.	Kristen Katholik	85	3,31%
3.	Kristen Protestan	70	2,72%
4.	Budha	5	0,19%
5.	Hindu	3	0,12%
Jumlah		2570	100%

Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Laweyan, Desember 2008

2.5 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Laweyan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Sarana Pendidikan di Kelurahan Laweyan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	1
3.	TPA	3
Jumlah		5

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

2.6 Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di kelurahan Laweyan berdasarkan data dari Daftar Isian Potensi Kelurahan 2006 terdapat 82 sarana perekonomian seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Sarana Perekonomian di Kelurahan Laweyan

No.	Sarana Perekonomian	Jumlah
1.	Koperasi	3
2.	Industri Makanan	4
3.	Industri Kerajinan	2
4.	Industri Pakaian	18
5.	Usaha Perdagangan	25
6.	Warung Makan	4
7.	Kios Kelontong	11
8.	Bengkel	5

9.	Toko	6
10.	Swalayan	1
11.	Percetakan	3
Jumlah		

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana perekonomian yang paling banyak di kelurahan Laweyan adalah sarana perekonomian usaha perdagangan yaitu 25 sarana. Sedangkan sarana yang paling sedikit adalah swalayan yaitu satu sarana.

2.7 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Laweyan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Sarana Kesehatan di Kelurahan Laweyan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik	3
2.	Apotik	1
3.	Posyandu	3
4.	Tempat Dokter Praktek	2
Jumlah		9

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

2.8 Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang ada di kelurahan Laweyan berdasarkan data dari Daftar Isian Potensi Kelurahan 2006 terdapat 752 sarana komunikasi seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Sarana Komunikasi di Kelurahan Laweyan

No.	Sarana Komunikasi	Jumlah
1.	Telepon	223
2.	Televisi	524
3.	Parabola	5
Jumlah		752

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

2.9 Sarana dan Prasarana Transportasi

Perkembangan fisik di kelurahan Laweyan sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia tentunya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi. Sarana transportasi berupa jalan di kelurahan Laweyan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Laweyan

No.	Sarana dan Prasarana	Panjang
1.	Jalan Aspal	1,7 km ²
2.	Jalan Konblok	1,8 km ²
3.	Jalan Tanah	0,1 km ²
Jumlah		3,6 km ²

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

Sebagian besar wilayah kelurahan Laweyan berupa jalan konblok sepanjang 1,8 km² sedangkan untuk jalan tanah hanya sepanjang 100 m. Di wilayah kelurahan Laweyan ini terdapat juga tiga (3) jembatan dengan rincian dua (2) jembatan beton dan satu (1) jembatan besi.

2.10 Keadaan Rumah Penduduk

Penduduk kelurahan Laweyan membuat rumahnya dari bahan dinding yang beraneka ragam seperti dari batu, sebagian batu, kayu atau papan, dan dari bambu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9

Keadaan Rumah Penduduk di Kelurahan Laweyan

No.	Dinding Rumah	Jumlah
1.	Terbuat dari batu/ gedung permanent	460
2.	Terbuat dari sebagian batu/ semi permanent	15
3.	Terbuat dari kayu atau papan	5
4.	Terbuat dari bambu/ bahan lainnya	3
Jumlah		483

Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan (2006).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rumah penduduk kelurahan Laweyan paling banyak adalah rumah dengan dinding rumah yang terbuat dari batu yaitu 460 rumah. Yang paling sedikit adalah rumah dengan dinding rumah yang hanya terbuat dari bambu atau bahan lainnya yaitu 3 rumah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia *Ad Hoc* yang pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan selaku penanggungjawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Musrenbangkel Laweyan tahun 2009-2010 telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 pukul 20.00-00.10 WIB bertempat di Balai Kampung Kelurahan Laweyan, Jln. Dr. Rajiman No. 521 Surakarta.

Pelaksanaan Musrenbangkel Laweyan tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut maka Musrenbangkel diselenggarakan dalam tiga tahapan, yaitu: Pra Musrenbangkel I, Pra Musrenbangkel II, dan Musrenbangkel. Untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Musrenbangkel Laweyan tahun 2009, dapat dicermati dalam penjelasan dibawah ini.

1. Pra Musrenbangkel I

1.1 Peserta Pra Musrenbangkel I

Dalam Pra Musrenbangkel I, peserta nya terdiri dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Laweyan. Sesuai dengan data dokumentasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, unsur-unsur masyarakat yang menghadiri Pra Musrenbangkel I ini terdiri dari:

Tabel 3.1

Unsur-Unsur Peserta Pra Musrenbangkel I

Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel I	
a. Pengurus LPMK	e. Tokoh Masyarakat
b. Pemerintah Kelurahan	f. Tokoh Agama
c. Pengurus RT/ RW	g. Fasilitator
d. Perwakilan Organisasi Pemuda	h. Organisasi Perempuan

Sumber: Berdasarkan data dokumentasi dan hasil pengamatan

Sesuai dengan pengamatan penulis, pra Musrenbangkel I telah dihadiri oleh semua unsur-unsur masyarakat seperti yang tertulis pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005.

1.2 Pelaksanaan Dan Hasil Pra Musrenbangkel I

Pra Musrenbangkel I Laweyan diawali dengan pembentukan panitia Musrenbangkel yang terdiri dari *Steering Commiittee (SC)* dan *Organizing Commiittee (OC)*.

a. *Steering Commiittee (SC)*

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota maka susunan keanggotaan SC terdiri dari unsur pimpinan LPMK, unsur tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan dengan mengupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah keanggotaan panitia. Susunan keanggotaan SC berdasarkan data dokumentasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Y.Suranto, S.Pd.

Sekretaris : H. Rosyadi M. Qodri

Anggota : Dewi Nasution, Sri Martani, Drs. Agung Purnomo,
Prasetyo.

Dengan adanya keterwakilan dua perempuan dalam keanggotaan panitia maka sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan SC telah memenuhi persyaratan minimal 30%.

Panitia pengarah (SC) dalam Musrenbangkel mempunyai tugas dan fungsi untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel;

- b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas di tingkat kelurahan;
 - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;
 - d. Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel;
 - e. Mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada Penanggung Jawab.
- b. *Organizing Commiittee (OC).*

Untuk susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara (OC) terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (SC) dengan diupayakan juga keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah panitia. Susunan keanggotaan OC berdasarkan data dokumentasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. HM Idris Sugiyanto, S.H, M.H.

Sekretaris : Amin R.

Anggota : Ibu Radian, Widiarso S.E., Bambang, Purnomo,
Purwanto, Fajar, Sumardi.

Dengan hanya adanya keterwakilan satu perempuan dalam keanggotaan panitia maka sesuai dengan Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan OC belum memenuhi persyaratan minimal 30% dari jumlah keseluruhan panitia.

OC mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan Panitia Pengarah (SC). Dalam pembentukan panitia, bapak Y. Suranto, S.Pd. terpilih sebagai ketua panitia Musrenbangkel Laweyan 2009. Dalam Pra Musrenbangkel I Laweyan 2009 secara singkat menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Musrenbangkel 2009 (Panitia Pengarah atau SC dan Panitia Pelaksana atau OC);
- b. Susunan tata tertib Musrenbangkel;
- c. Susunan mekanisme sosialisasi dan jadwal musyawarah RT/RW;
- d. Penetapan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel;
- e. Susunan anggaran Musrenbangkel;
- f. Pembagian tugas panitia Musrenbangkel;
- g. DSP dari RT/RW dan kelompok masyarakat;
- h. Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Hasil keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel I 2009 ini yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Laweyan ini

berikutnya menjadi bahan Pra Musrenbangkel II (draft Form IV A dan Form IV B).

2. Pra Musrenbangkel II

2.1 Peserta Pra Musrenbangkel II

Dalam Pra Musrenbangkel II, peserta nya terdiri dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Laweyan. Sesuai dengan data dokumentasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, unsur-unsur masyarakat yang menghadiri Pra Musrenbangkel I dan Pra Musrenbangkel II tidak jauh berbeda. Dalam Pra Musrenbangkel II ada tambahan unsur dari panitia yang telah dibentuk pada Pra Musrenbangkel I (Tabel 3.1) dan tambahan unsur dari sektor privat, misalnya pengusaha, investor, dan pedagang. Untuk pemerintah Kelurahan tidak termasuk dalam peserta Pra Musrenbangkel II ini.

2.2 Pelaksanaan Dan Hasil Pra Musrenbangkel II

Jalannya acara Pra Musrenbangkel II dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangkel dengan dibantu fasilitator Kelurahan. Kegiatan Pra Musrenbangkel II 2009 di kelurahan Laweyan menghasilkan:

- a. Analisis potensi Kelurahan;
- b. Draf bahan Musrenbangkel I dan usulan baru dari RT/RW;
- c. DSP (Daftar Skala Prioritas) per fungsi;
- d. Sasaran pembangunan tahunan Kelurahan;
- e. Draf DSP Musrenbangkel.

Berikutnya, hasil keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel II 2009 di kelurahan Laweyan adalah draf DSP (Daftar Skala Prioritas) yang selanjutnya menjadi bahan pelaksanaan Musrenbangkel 2009 di Kelurahan Laweyan.

3. Musrenbangkel

3.1 Peserta Musrenbangkel

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dengan mengupayakan penyelenggaraan Musrenbangkel dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Sesuai dengan data dokumentasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, unsur-unsur masyarakat yang menghadiri Pra Musrenbangkel I dan Musrenbangkel tidak jauh berbeda. Dalam Musrenbangkel ada tambahan unsur seperti:

- a. Wakil Organisasi Sosial, misalnya Paguyuban Orang Tua Asuh, Paguyuban Kelompok Informal, Paguyuban Kesepuhan, KSM, dan organisasi sosial lainnya;
- b. Wakil Kelompok Sosial, misalnya Forum-Forum warga, Kelompok Pedagang Kecil, Tukang Becak, Pedagang Kaki Lima,

Pengamen, Kelompok-Kelompok Potensial lainnya yang belum terorganisir;

- c. Wakil Organisasi Kesenian, misalnya Kelompok Karawitan, Kelompok Orkes Keroncong, Sanggar Tari, Sanggar atau Pawiyatan Jawi, Kelompok Campursari, Ketoprak;
- d. Sektor Privat, misalnya Pengusaha, Investor, Pedagang;

3.2 Pelaksanaan Dan Hasil Musrenbangkel

Sesuai dengan tahapan-tahapan Musrenbangkel berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005, persidangan dalam Musrenbangkel Laweyan 2009 meliputi tiga sidang, dengan masing-masing hasil sidang sebagai berikut:

a. Sidang Pleno I

Dalam sidang pleno I menghasilkan:

- Dipilihnya pimpinan sidang dipimpin oleh *Steering Committee*;
- Disahkannya tata tertib;
- Pemaparan prioritas program atau kegiatan pembangunan di kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Camat atau pemerintah Kecamatan;
- Pemaparan prioritas program atau kegiatan kelurahan tahun berikutnya beserta informasi perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (*Block Grant*) oleh Lurah;

- Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan masyarakat (misalnya Ketua RW, Komite Sekolah, Ketua Kelompok Usaha, dll);
- Penetapan tata cara penyeleksian prioritas kegiatan.

b. Sidang Komisi

Dalam sidang komisi menghasilkan:

Penyusunan, validasi dan rekapitulasi prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah:

- 1) yang akan didanai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (*Block Grant*) dan atau Swadaya Masyarakat;
- 2) yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.

c. Sidang Pleno II

Dalam sidang pleno II menghasilkan:

- Pemaparan hasil sidang komisi;
- Tanggapan;
- Pengesahan hasil sidang pleno II;
- Pembentukan Tim Penyempurnaan Perumusan;
- Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri dari:
 - Panitia Penyelenggara (SC/ OC);
 - Perwakilan Sidang Komisi.

- Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab;
- Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang prosesnya dipimpin oleh Penanggung Jawab;
- Penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbangkel diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi.

Dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan data dokumentasi dan data observasi, pelaksanaan Musrenbangkel yang dilaksanakan di Kelurahan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2009 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dengan melibatkan seluruh unsur di masyarakat Kelurahan Laweyan.

B. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel

Profil aktivitas merupakan salah satu tinjauan dalam penelitian ini. Profil aktivitas adalah profil yang mendasarkan pada pembagian kerja gender yang memuat daftar tugas perempuan dan tugas laki-laki dengan melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh perempuan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh laki-laki.

Untuk melihat aktivitas perempuan didalam Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 peneliti melihat dari aspek kehadiran perempuan dalam forum tersebut dan keaktifan perempuan dalam mengikuti masing-masing tahapan di dalam musrenbangkel.

Forum Musrenbangkel di tahun 2009 ini, perempuan yang hadir berasal dari perwakilan PKK mulai dari tingkat RT dan kemudian PKK tingkat RW, kepengurusan LPMK, dan organisasi sosial perempuan. Panitia Musrenbangkel telah memberikan undangan kepada PKK untuk mengirimkan perwakilannya sebanyak lima (5) orang. Berbeda dengan undangan yang lainnya, jumlah undangan untuk PKK terhitung cukup besar karena umumnya untuk undangan yang lainnya hanya dibatasi oleh satu undangan yang ditujukan kepada ketua organisasi. Untuk mengetahui jumlah perempuan yang hadir didalam Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Prosentase Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

No.	Elemen Peserta	Laki-Laki	Prosentase (%)	Perempuan	Prosentase (%)	Jumlah
1.	Sektor Privat	14	20,3	-	0	14
2.	Tokoh Masy.	15	21,7	-	0	15
3.	Karang Taruna	1	1,4	-	0	1
4.	LPMK	15	21,7	2	2,9	17
5.	Kelurahan	1	1,4	-	0	1
6.	RT	9	13	3	4,3	12
7.	RW (PKK)	3	4,3	2	2,9	5

8.	Organ. Sosial	3	4,3	1	1,4	4
	Jumlah	61	88,4	8	11,6	69

Sumber : Diolah dari data primer Kelurahan Laweyan.

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah prosentase kehadiran perempuan di dalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 hanya mencapai 11,6%. Jumlah ini terpatut jauh jika dibandingkan dengan jumlah kehadiran laki-laki yang mencapai hingga 88,4%.

Di dalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009, aktivitas yang dilakukan oleh perempuan cukup aktif. Sekalipun forum tersebut berlangsung hingga larut malam, perempuan tetap mengikuti tahapan-tahapan Musrenbangkel dengan seksama. Begitupun juga dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Selama berlangsungnya forum Musrenbangkel, panitia memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan yang membangun. Dalam kesempatan itu, perempuan telah mengemukakan banyak masukan saran kepada pimpinan sidang. Sebagian dari masukan saran nya adalah sebagai berikut:

“...Masyarakat di Kelurahan Laweyan dengan angka pengangguran yang masih tinggi, dalam tahun ini harus ada anggaran dari pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan kewirausahaan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengikuti kursus ketrampilan secara gratis...”.
(disampaikan oleh Ibu Y. Endang)

“...Sekarang ini banyak anak-anak yang sudah lupa dengan kebudayaannya sendiri terbukti dari kurang berminatnya generasi muda kepada bidang kesusastraan budaya. Untuk mengantisipasi itu, perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan seni untuk anak-anak...”.
(disampaikan oleh Ibu Murhidayah)

“...Untuk bidang Lingkungan Hidup yang belum lama berdiri, memerlukan dana operasional yang cukup besar untuk membiayai penyuluhan dan pelatihan selama 1 tahun. Untuk itu, diharapkan dana operasional tersebut dimasukkan kedalam DSP (Daftar Skala Prioritas)...”.

(disampaikan oleh Ibu Dewi)

“...Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKK masih kurang. Untuk itu, perlu adanya pemenuhan kebutuhan operasional PKK agar dapat berjalan dengan lancar...”.

(disampaikan oleh Ibu Radian)

Dari profil aktivitas yang dilakukan oleh perempuan dalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 disimpulkan bahwa ternyata kehadiran perempuan di kelurahan Laweyan belum mencapai kuota minimal 30% dari jumlah peserta, seperti yang tertulis dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005. Sekalipun jumlah prosentase perempuan hanya mencapai 11,6% dari jumlah keseluruhan peserta, dalam forum tersebut perempuan tidak hanya hadir melainkan juga aktif dengan memberikan banyak masukan di dalam forum.

C. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Profil akses digunakan untuk menganalisis siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya produktif dengan memuat daftar pertanyaan perempuan mempunyai atau memperoleh sumber daya apa? laki-laki memperoleh apa? perempuan menikmati apa? dan laki-laki menikmati apa? Untuk mengetahui akses perempuan dalam musrenbangkel, penulis meneliti peluang dan kesempatan yang diperoleh perempuan dalam menggunakan sumberdaya tertentu dengan melihat keterlibatan perempuan dalam empat sidang komisi yang ada di dalam Musrenbangkel Laweyan tahun 2009. Dengan adanya keterlibatan perempuan

dalam sidang komisi, ini berarti perempuan telah memiliki kesempatan untuk meng-*goal*-kan aspirasi dan masukan-masukan nya didalam Daftar Skala Prioritas (DSP) karena didalam sidang komisi inilah perempuan dapat mempertahankan aspirasi nya untuk dapat lolos dalam seleksi daftar skala prioritas pembangunan.

Didalam Musrenbangkel, peserta dimasukkan kedalam empat komisi yang berbeda-beda yaitu komisi fisik dan prasarana, komisi umum, komisi ekonomi, dan komisi sosial budaya. Untuk lebih rincinya, pembagian sektor ke dalam masing-masing komisi Musrenbangkel, dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

1) Komisi Fisik dan Prasarana, meliputi:

a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

1. Lingkungan hidup dan tata ruang

Sub sektor:

- Lingkungan hidup
- Tata ruang

2. Perumahan dan lingkungan

Sub sektor:

- Perumahan dan Lingkungan

b. Prasarana Kota

1. Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali

Sub sektor:

- Pembangunan daerah bawahan
- Pembangunan kota
- Pemukiman kembali

- Telekomunikasi
- Penataan bangunan

2) Komisi Umum, meliputi:

- a. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Aparatur pemerintah
 - 1. Pemerintah dan pengawasan
 - Sub sektor:
 - Aparatur pemerintah
 - Pendayagunaan sistem pelaksanaan pengawasan
- c. Politik
- d. Komunikasi dan media massa
 - 1. Penerangan, komunikasi, dan media massa
- e. Ketentraman dan ketertiban
 - 1. Keamanan dan ketertiban umum
- f. Hukum

3) Komisi Ekonomi, meliputi:

- a. Industri
- b. Pertanian dan kehutanan
 - 1. Pertanian rakyat
 - 2. Perkebunan
 - 3. Peternakan
 - 4. Perikanan
- c. Perdagangan, pengembangan dunia usaha, keuangan dan koperasi

1. Perdagangan dalam negeri
 2. Pengembangan usaha daerah
 3. Keuangan daerah
 4. Koperasi dan pengusaha
- d. Transportasi
1. Prasarana jalan
 2. Transportasi darat
 3. Transportasi udara dan perintis
- e. Pertambangan dan energi
1. Pertambangan rakyat
 2. Energi atau listrik pedesaan
- f. Pariwisata
- 4) Komisi Sosial Budaya, meliputi:
- a. Kesejahteraan sosial
1. Kependudukan
 2. Keluarga sejahtera
- Sub sektor:
- Kependudukan dan keluarga sejahtera
 - Kesejahteraan sosial
 - Peranan wanita
- b. Pendidikan
1. Pendidikan
 2. Kebudayaan nasional

3. Kepercayaan terhadap Tuhan YME

4. Pemuda dan olahraga

Sub sektor:

- Pendidikan
- Pendidikan luar sekolah dan kedinasan
- Penerapan teknik produksi dan teknologi
- Penelitian
- Kelautan
- Kedirgantaraan
- Sistem informasi dan statistik
- Pemuda dan olahraga

c. Budaya

1. Kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME

d. Agama

1. Pelayanan kehidupan beragama
2. Pembinaan pendidikan

e. Kesehatan

Pembagian ke dalam masing-masing komisi itulah yang akan memberikan kesempatan dan juga peluang yang sama baik itu kepada perempuan maupun laki-laki melalui sidang komisi untuk memiliki kontribusi yang sama dalam memutuskan usulan-usulan masyarakat yang mana saja yang akan dimasukkan kedalam Daftar Skala Prioritas (DSP). Dengan keterlibatan perempuan kedalam

sidang komisi baik itu komisi fisik dan prasarana, komisi umum, komisi ekonomi, dan komisi sosial budaya secara langsung perempuan telah memiliki kesempatan dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk masuk kedalam daftar skala prioritas pembangunan.

Dengan memasukkan berbagai kepentingan perempuan diharapkan bahwa proses-proses pengambilan keputusan di dalam sidang komisi dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan seperti perbedaan kepentingan gender. Sebagaimana kepentingan laki-laki, kepentingan perempuan bisa sangat beragam sesuai dengan pengalaman dan prioritas yang dimilikinya yang mungkin berujung pada agenda keputusan yang berbeda pula. Oleh karena itu, didalam sidang komisi sebagai forum untuk dapat mempertahankan aspirasi atau usulan, partisipasi yang aktif dari perempuan sangatlah penting. Dengan diperjuangkannya aspirasi perempuan menjadi daftar skala prioritas, anggaran biaya yang diperoleh akan dapat mencukupi kebutuhan organisasi mereka dalam masa 1 tahun mendatang. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ibu Martani:

“...Musrenbangkel itu penting sekali, terutama untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Motivasi kita dari ibu-ibu PKK mengikuti Musrenbangkel ini selain berkeinginan untuk memajukan wilayah Laweyan juga ingin meng-*goal*-kan biaya. Karena apabila kita memperoleh dana yang sedikit maka pelaksanaan program-program PKK akan terhambat...”.

Dari Musrenbangkel Laweyan 2009 yang terbagi ke dalam empat komisi, komposisi keterlibatan perempuan dan laki-laki ke dalam masing-masing komisi dapat dicermati pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3

Komposisi Peserta Sidang Komisi Musrenbangkel Laweyan 2009

No.	Komisi	Jumlah Laki-Laki	Prosentase (%)	Jumlah Perempuan	Prosentase (%)
1.	Fisik dan prasarana	16	100	-	0
2.	Umum	15	88,2	2	11,8
3.	Ekonomi	15	88,2	2	11,8
4.	Sosial budaya	15	78,9	4	21,1
Jumlah		61	88,4	8	11,6

Sumber: data panitia Musrenbangkel Laweyan tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan peserta sidang komisi sebanyak 69 peserta terdapat ketimpangan jumlah prosentase keterwakilan perempuan dengan jumlah prosentase keterwakilan laki-laki. Ketimpangan yang paling mencolok berada di dalam komisi fisik dan prasarana yang mana jumlah prosentase laki-laki mutlak sebesar 100%. Disusul dengan prosentase perempuan yang sama dalam komisi umum dan komisi ekonomi yang mana prosentase perempuan hanya 11,8%. Berikutnya, prosentase perempuan sebesar 21,1% yang berada di dalam komisi sosial budaya.

Dilihat dari komposisi peserta sidang komisi terdapat ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan terutama didalam komisi fisik dan prasarana yang mana semua peserta nya adalah laki-laki. Tidak adanya keterwakilan perempuan didalam komisi fisik dan prasarana bisa menjadikan tidak terwakilkannya aspirasi perempuan di dalam komisi tersebut karena sebagaimana kepentingan laki-laki maka kepentingan perempuan juga bisa sangat beragam sesuai dengan

pengalaman dan prioritas yang dimilikinya yang mungkin berujung pada agenda keputusan yang berbeda pula.

Masyarakat di kelurahan Laweyan sebagian besar masih memiliki anggapan bahwa komisi fisik dan prasarana adalah komisi khusus urusan dan pekerjaan laki-laki. Sedangkan perempuan dianggap lebih cocok terlibat didalam komisi-komisi yang lainnya terutama dalam komisi sosial dan budaya yang fokus kepada kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, dll. Berkaitan dengan keterlibatan perempuan di dalam sidang komisi Musrenbangkel, informan Ibu Radian menanggapi:

“...Iya, untuk komisi fisik dan prasarana memang sesuai untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu saya kira tidak sesuai di komisi tersebut karena saya sendiri saja tidak paham tentang masalah-masalah pembangunan seperti jembatan, saluran air, jalan kampung. Beda kalau di komisi lain seperti sosial budaya ataupun umum, kita masih bisa memahaminya...”.

Dari hasil observasi penulis, keterasingan perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan sarana-prasarana pembangunan terlihat jelas oleh salah satu informan perempuan yang menjadi tim penyempurna rumusan Daftar Skala Prioritas. Dalam rapat kecil paska Musrenbangkel untuk menyempurnakan rumusan DSP, peneliti mengamati bahwa informan perempuan tersebut terlihat bingung dengan pembahasan-pembahasan tentang fisik dan prasarana. Maka cukup beralasan apabila banyak perempuan yang menganggap bahwa komisi fisik dan prasarana bukan komisi yang tepat untuk perempuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara secara *focus group discussion* dan juga melalui pengamatan secara langsung,

ditarik kesimpulan bahwa dari profil akses yang diperoleh perempuan dalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam komisi fisik dan prasarana (0%), komisi umum (11,8%), komisi ekonomi (11,8%) dan komisi sosial budaya (21,1%). Akses perempuan didalam Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta Tahun 2009 melalui sidang komisi paling banyak berada di komisi sosial budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dalam komisi sosial budaya dibandingkan dengan komisi yang lainnya.

D. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Dalam profil kontrol berdasarkan pada pertanyaan perempuan mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumber daya apa? dan laki-laki penentu sumber daya apa? Kontrol perempuan didalam forum Musrenbangkel berkaitan dengan seberapa besar perempuan memperoleh posisi strategis atau jabatan pada sidang komisi ataupun sidang pleno. Dengan adanya posisi strategis yang diberikan kepada perempuan sangatlah penting karena dengan kontrol yang besar dari perempuan, mereka memiliki kekuatan untuk mengontrol apabila di dalam berjalannya Musrenbangkel terdapat ketidaksesuaian untuk kepentingan perempuan terutama dalam proses penyusunan daftar skala prioritas. Selain itu, perempuan akan lebih memiliki kesempatan untuk memasukkan dan memperjuangkan berbagai kepentingan perempuan didalam Musrenbangkel karena sebagaimana kepentingan laki-laki, kepentingan perempuan juga bisa sangat beragam sesuai dengan pengalaman dan prioritas yang dimilikinya yang mungkin berujung pada agenda keputusan yang berbeda pula. Untuk komposisi

panitia musrenbangkel tahun 2009 menurut jenis kelamin di kelurahan Laweyan dapat dicermati dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Komposisi Panitia Musrenbangkel Laweyan tahun 2009 Menurut Jenis Kelamin

No.	Kepanitian Musrenbangkel	Ketua		Sekretaris		Anggota	
		L	P	L	P	L	P
1.	Panitia SC	1	-	1	-	2	2
1.	Panitia OC	1	-	1	-	5	1
2.	Bidang Komisi						
	■ Fisik Prasarana	1	-	1	-	14	-
	■ Umum	1	-	1	-	13	2
	■ Ekonomi	1	-	1	-	13	2
	■ Sosial Budaya	1	-	1	-	9	4
2.	Tim Penyempurna Rumusan DSP	1	-	1	-	2	1
3.	Tim Pelaks. Pemb	1	-	1	-	3	1
4.	Tim Monev.	1	-	1	-	4	1
Jumlah		9	-	9	-	65	14

Sumber: Diolah dari data primer panitia Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

Dengan mencermati tabel diatas dapat diketahui bahwa perempuan dalam Musrenbangkel kurang memiliki kontrol karena dari sekian banyaknya posisi strategis didalam forum baik itu sebagai *Steering Commiittee (SC)*, *Organizing Commiitté (OC)*, Ketua Komisi hingga Ketua Tim, tidak ada perempuan yang menduduki posisi sebagai ketua ataupun wakil ketua. Jumlah keseluruhan perempuan hanya menduduki posisi sebagai anggota saja. Padahal untuk dapat memperjuangkan permasalahan perempuan agar dapat masuk ke dalam daftar

skala prioritas pembangunan, maka perempuan haruslah terlibat dan berpartisipasi langsung didalam Musrenbangkel termasuk dengan menjadi panitia Musrenbangkel yang memiliki kewenangan strategis.

Posisi strategis perempuan didalam Musrenbangkel sangatlah penting karena didalam forum tersebut semua usulan dari semua unsur masyarakat kemudian ditampung dan kemudian diseleksi menjadi usulan yang termasuk dalam DSP (Daftar Skala Prioritas). Usulan masyarakat yang berhasil masuk kedalam DSP, nantinya akan di-*goal* kan oleh forum dan kemudian akan memperoleh anggaran untuk membiayai agenda-agenda tertentu. Apabila didalam forum pengambilan keputusannya, perempuan mempunyai andil yang cukup besar maka kemungkinan usulan-usulan perempuan untuk masuk kedalam DSP akan besar juga.

Permasalahan tidak adanya perempuan yang mempunyai posisi strategis dikarenakan oleh faktor diri sendiri. Banyak perempuan yang menolak apabila ditawarkan posisi-posisi strategis. Kurangnya keterwakilan perempuan didalam posisi yang strategis juga sangat disayangkan oleh informan laki-laki. Dalam pemilihan panitia Musrenbangkel, sebelumnya telah ditawarkan secara umum kepada semua peserta baik itu laki-laki ataupun perempuan, namun ketika tawaran dalam posisi yang strategis itu ditawarkan kepada perempuan, tawaran tersebut ditolak. Alasan dari informan Ibu Radian, yaitu:

“...Dalam musyawarah untuk pembentukan panitia, mereka (peserta laki-laki Musrenbangkel) menghendaki adanya pergantian. Sekali-sekali perempuan lah yang menjadi pimpinan sidang. Tapi kan saya juga menyadari bahwa saya tidak paham benar tentang pasal-pasal, Perda, dll. Padahal Musrenbangkel itu kan penting sekali. Mengukur kemampuan (SDM) diri sendiri lah, mbak...”.

Pendapat yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh Ibu Dewi:

“...Iya, mereka (peserta laki-laki Musrenbangkel) menghendaki pergantian perempuan sehingga ada kesejajaran. Ketika ada tawaran untuk menjadi sekretaris SC saja, saya tidak mau karena pasti repot. Apalagi untuk tawaran sebagai ketua, pasti akan jauh lebih repot karena yang menjadi ketua pasti akan dikirim sebagai delegasi ke Musrenbangcam kemudian ke Musrenbangkot. Nah, kalau sudah begitu akan semakin repot...”.

Menanggapi komentar yang disampaikan oleh informan perempuan tentang kurangnya minat perempuan menduduki posisi strategis, Pak Zulfikar menyatakan:

“...Apabila yang menjadi kendala itu adalah faktor SDM, sebenarnya itu hanya anggapan ibu-ibu saja. Banyak ibu-ibu yang merasa tidak mampu padahal ketika ada banyak tugas, ibu-ibu mampu menyelesaikannya. Saya berkali-kali menawarkan kesempatan kepada perempuan karena saya menilai ibu-ibu lebih melihat pada kepentingan dan kebutuhan, bukan keinginan seperti yang bapak-bapak inginkan...”.

Selain karena alasan kurang percaya diri akan kemampuan yang dimiliki oleh ibu-ibu, kurang berminatnya perempuan untuk menjadi ketua ataupun jabatan yang lebih strategis lainnya juga dikarenakan perempuan sudah merasa repot dengan kegiatan rumah tangga nya. Jumlah perempuan di kelurahan Laweyan banyak yang masih berusia produktif sehingga mereka lebih memilih untuk mendidik anak dan mengelola rumah tangga daripada hadir didalam forum Musrenbangkel. Didalam buku Soedarmono (2006: 84) yang membahas secara keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Laweyan yang dikenal sebagai kampung juragan Batik ini dituliskan bahwa dimulai sejak pertumbuhan seni kerajinan batik, pekerjaan membatik itu dianggap cukup ideal bagi wanita-wanita di Laweyan sebagai pekerjaan sambilan dirumah selain sebagai pengasuh anak

dan penunggu rumah. Maka secara hati-hati mereka menghindari keterlibatan dalam urusan politik, hukum dan pemerintah karena hal itu hanya membuang waktu yang dirasakan tidak produktif (hal. 100).

Pelabelan di masyarakat Laweyan bahwa peran domestik adalah suatu hal yang kodrati dan alamiah bagi perempuan sehingga tidak bisa dipungkiri jika perempuan menjadi sangat terbatas untuk bisa berpartisipasi didalam struktur pemerintahan maupun didalam masyarakat secara umum. Meski mereka menganggap bahwa aktivitas publik (diluar rumah) merupakan kegiatan yang wajar bagi mereka. Namun karena begitu dalamnya internalisasi pelabelan ini maka partisipasi mereka dalam aktivitas publik sangat terbatas. Sebagian besar informan perempuan misalnya menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugasnya yang utama dan aktivitas publik hanya dapat dilakukan ketika urusan rumah tangga sudah selesai. Sehingga tidak mengherankan jika kategori “wajar” menurut informan adalah ketika seorang perempuan beraktivitas publik (diluar rumah) tetapi tetap harus menyelesaikan “kewajiban” domestiknya. Sementara untuk informan laki-laki juga akan mengizinkan istrinya untuk beraktivitas diluar rumah ketika tanggungjawab terhadap rumah tangga sudah terpenuhi, “*kowe iso ngukur dhewe, aturen awakmu dhewe*, kamu tau sendiri tanggungjawab kamu terhadap rumah tangga”, demikian komentar salah satu informan laki-laki. Ibu Martani sebagai anggota senior didalam PKK yang sudah lama aktif dalam Musrenbangkel, menyatakan bahwa:

“...Untuk ibu muda masih harus mendidik anak sehingga tidak diijinkan oleh suami. Sekalipun ada yang aktif, itupun cuma ada satu atau dua ibu muda. Ibu-ibu di Laweyan bukan ibu rumah tangga murni karena sebagian besar adalah wiraswasta sehingga untuk meluangkan

waktu luangnya menjadi hambatan. Saya pun bisa aktif didalam kegiatan kemasyarakatan setelah anak-anak saya sudah besar,mbak...”.

Faktor lain seperti faktor agama juga mempengaruhi keinginan ibu-ibu untuk terlibat dalam forum Musrenbangkel ataupun forum publik lainnya. Karena biasanya forum-forum umum di Laweyan diselenggarakan pada waktu malam yaitu bada' isya maka acara akan selesai ketika sudah larut malam. Budaya religi yang terdapat di Kelurahan Laweyan masih sangat kental, maka menjadi hal yang tidak lumrah ketika seorang perempuan berpergian hingga larut malam tanpa didampingi oleh suami ataupun keluarganya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kontrol perempuan didalam forum Musrenbangkel Laweyan tahun 2009 masih kurang karena dari sekian banyak kepengurusan panitia Musrenbangkel, sama sekali tidak ada posisi strategis sebagai ketua ataupun wakil ketua yang diduduki oleh perempuan. Keseluruhan perempuan lebih memilih untuk menjadi anggota saja. Faktor yang berpengaruh diantaranya adalah tidak percaya dirinya perempuan didalam forum publik karena selama ini perempuan lebih banyak berkutat di wilayah domestik. Faktor beban ganda (*double burden*) sehingga perempuan akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya terlebih dahulu sebelum menjalani aktivitas publik. Selain kedua faktor tersebut, juga dikarenakan faktor religi yang sudah mengakar sehingga masyarakat akan menilai sebagai hal yang tabu apabila terdapat perempuan yang keluar pada malam hari.

E. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Di Dalam Musrenbangkel

Forum musrenbangkel yang pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun, dalam prosesnya benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan sebagai media dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan. Dalam Musrenbangkel tahun 2009 ini, aspirasi perempuan di Kelurahan Laweyan secara keseluruhan dapat terpenuhi karena usulan-usulan tersebut 100% masuk kedalam DSP (Daftar Skala Prioritas) pembangunan. Sekalipun keterwakilan perempuan didalam Musrenbangkel lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun usulan-usulan perempuan telah diterima oleh forum untuk masuk dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan yang kemudian akan diberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Berbeda dengan laki-laki yang tidak semua usulannya *di-goal* kan oleh forum. Menanggapi ini, informan perempuan mengatakan bahwa:

“...Untuk kaum laki-laki, mereka juga tidak *meri* karena mereka sadar betul bahwa pelaksanaan PKK itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan yang paling penting, pelaksanaan PKK itu juga untuk keluarga...”.

Sedangkan untuk informan laki-laki juga menimpali bahwa:

“...Dalam Musrenbangkel 2009 ini, PKK mendapat dana 18 juta. Semua usulan yang diajukan oleh ibu-ibu, oleh forum semua usulannya *di-goal* kan. Saya pikir dana sekian banyak itu tidak berlebihan karena semua kegiatan yang diagendakan oleh ibu-ibu pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan untuk keluarga....”.

Untuk dapat mengamati dengan lebih cermat, maka usulan masyarakat yang masuk kedalam daftar skala prioritas pembangunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Usulan masyarakat yang bersifat umum dengan orientasi dan tujuannya untuk kepentingan umum yang menyinggung semua orang (laki-laki dan perempuan).

- b) Usulan masyarakat yang responsif perempuan yaitu usulan masyarakat yang orientasi dan tujuannya untuk kepentingan perempuan.

Dibawah ini adalah hasil Musrenbangkel yang mencakup usulan-usulan dari masyarakat kelurahan Laweyan .

Tabel 3.4

Rekap Usulan Masyarakat Dalam Forum Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

No.	Komisi Dalam Musrenbangkel	Usulan-Usulan		Jumlah
		Umum	Responsif Gend.	
1.	Fisik dan prasarana	26	-	26
2.	Umum	5	2	7
3.	Sosial Budaya	18	3	21
4.	Ekonomi	12	5	17
Jumlah		61	10	71

Sumber: Diolah dari data primer panitia Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

Berikutnya adalah daftar-daftar usulan masyarakat yang akan diusulkan ke dalam forum Musrenbangcam Laweyan tahun 2009, yang dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5

Usulan Masyarakat Yang Diusulkan ke Musrenbangcam Laweyan Tahun 2009

No.	Komisi Dalam Musrenbangkel	Usulan-Usulan		Jumlah
		Umum	Responsif Gend.	
1.	Fisik dan prasarana	11	-	11
2.	Umum	7	1	8
3.	Sosial Budaya	4	2	6
4.	Ekonomi	11	-	11
Jumlah		33	3	36

Sumber: Diolah dari data primer panitia Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

Mencermati dari kedua tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan yang responsif perempuan, yaitu:

- 1) Jumlah usulan masyarakat kelurahan Laweyan dalam daftar skala prioritas pembangunan yang responsif perempuan yang dibiayai dari dana bantuan pembangunan kelurahan dan swadaya masyarakat yaitu sebanyak 10 usulan dengan prosentase 14%, dan
- 2) Jumlah usulan masyarakat Kelurahan Laweyan dalam daftar skala prioritas pembangunan yang responsif perempuan yang diusulkan dalam Musrenbangcam tahun 2009 adalah sebanyak 3 usulan (8,3%)

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah daftar skala prioritas pembangunan hasil Musrenbangkel Kelurahan Laweyan tahun 2009 yang responsif perempuan masih sedikit, namun demikian perempuan kelurahan Laweyan telah memperoleh manfaat yang besar dari Musrenbangkel karena forum ini telah memperhatikan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan perempuan.

F. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam Musrenbangkel

Minimnya tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel kelurahan Laweyan kota Surakarta tahun 2009 disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa hambatan yang teridentifikasi dalam FGD adalah:

- a. Aktivitas pertemuan musrenbangkel yang sering dilaksanakan pada malam hari yang bertentangan dengan kultur di dalam masyarakat yang menganggap tabu bagi perempuan yang keluar malam.

- b. Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas publik.

Mengenai kendala beban kerja perempuan dapat dilihat dalam pernyataan berikut ini:

“...Hambatan saya sebenarnya adalah bagaimana cara meluangkan waktu, pagi kerja hingga siang untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak. Dan malam hari nya saya pergunakan untuk istirahat. Untuk mengikuti kegiatan Musrenbangkel yang biasanya diselenggarakan pada waktu malam hari, saya sudah merasa kelelahan...”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa peran domestik diyakini bukan menjadi beban bagi perempuan sekalipun itu harus dibagi dengan aktivitas perempuan di luar (peran publik). Dengan anggapan tersebut ketika perempuan harus berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas publik, maka tanggungjawab perempuan atas pekerjaan domestik harus sudah dapat diselesaikan. Akibatnya, ketika perempuan masuk di wilayah publik akan memunculkan beban ganda (*double burden*) pada diri perempuan. Beban kerja domestik ini terlihat dalam pernyataan informan perempuan yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang juga menganggap bahwa pekerjaan domestik menjadi tugas dan pekerjaan perempuan didalam keluarga.

“...Untuk beban kerja ganda sudah saya niati sebagai ibadah untuk mencari bekal di akhirat. Bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang sekitar kan adalah sesuatu hal yang baik. Maka jangan sampai ketika saya mengikuti kegiatan publik saya mengabaikan kebutuhan keluarga, jadi semua urusan rumah tangga sudah harus beres...”

- c. Masyarakat yang telah menyakini bahwa perempuan identik dengan domestik maka menjadi wajar jika banyak perempuan yang enggan untuk mengikuti aktivitas di forum publik seperti Musrenbangkel, sehingga ini juga bisa menjadi kendala bagi keterlibatan perempuan di dalam forum publik.
- d. Faktor rendahnya pendidikan perempuan yang berakibat tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif dan maskulin, seperti halnya yang disampaikan oleh informan Ibu Radian sebagai berikut:

“...Tidak semua perempuan di kelurahan Laweyan yang tanggap dan mengkritisi perkembangan-perkembangan di Laweyan khususnya perkembangan fisik dan prasarana yang saat ini sedang pesatnya dikembangkan oleh Laweyan. Dan karena masih banyak perempuan di kelurahan Laweyan yang tidak paham dengan fisik dan prasarana maka banyak yang enggan untuk mengikuti Musrenbangkel ini. Selain itu juga tidak semua perempuan di Kelurahan Laweyan yang paham Musrenbangkel...”.

Informan laki-laki dari bapak Zulfikar juga menambahkan:

“...Saya mengamati bahwa dari latar belakang pendidikan, sumber daya manusia bapak-bapak memang lebih baik dibandingkan dengan ibu-ibu. Selain itu, ibu-ibu disini kebanyakan sudah merasa tidak mampu untuk segala urusan di dalam Musrenbangkel, padahal itu belum tentu benar...”

- e. Tidak ada mekanisme yang diciptakan secara khusus agar perempuan yang masih lekat dengan peran domestiknya bisa secara maksimal untuk menjalankan aktivitas publiknya seperti waktu rapat yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.1. Musrenbangkel Laweyan Tahun 2009

Pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2009 yang dilaksanakan di kelurahan Laweyan kota Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2009 di kelurahan Laweyan Kota Surakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kelurahan Laweyan dan melalui tahapan kegiatan Musrenbangkel mulai dari pra musrenbangkel I, pra musrenbangkel II dan musrenbangkel serta telah menghasilkan:
 - a. Usulan yang masuk dalam daftar skala prioritas pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan pembangunan kelurahan dan swadaya masyarakat.
 - b. Usulan yang masuk dalam daftar skala prioritas pembangunan yang diajukan atau diusulkan ke Musrenbangcam tahun 2009 Kelurahan Laweyan kota Surakarta.

1.2. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel

Kehadiran perempuan di Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 belum mencapai kuota minimal 30% dari jumlah peserta seperti yang tertulis dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun

2005. Sekalipun jumlah prosentase perempuan hanya mencapai 11,6% dari jumlah keseluruhan peserta, dalam forum tersebut perempuan tidak hanya hadir melainkan juga aktif dengan memberikan banyak masukan di dalam forum.

1.3. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Akses yang diperoleh perempuan dalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam komisi fisik dan prasarana (0%), komisi umum (11,8%), komisi ekonomi (11,8%) dan komisi sosial budaya (21,1%). Akses perempuan didalam Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta Tahun 2009 melalui sidang komisi paling banyak berada di komisi sosial budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dalam komisi sosial budaya dibandingkan dengan komisi yang lainnya.

1.4. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Kontrol perempuan didalam forum Musrenbangkel Laweyan Kota Surakarta tahun 2009 masih kurang karena dari sekian banyak kepengurusan panitia Musrenbangkel, sama sekali tidak ada posisi strategis sebagai ketua ataupun wakil ketua yang diduduki oleh perempuan. Keseluruhan peserta perempuan lebih memilih untuk menjadi anggota saja

1.5. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Di Dalam Musrenbangkel

Pada daftar skala prioritas pembangunan hasil Musrenbangkel Kelurahan Laweyan tahun 2009 yang responsif perempuan masih

sedikit, namun demikian perempuan kelurahan Laweyan telah memperoleh manfaat yang besar dari Musrenbangkel karena forum ini telah memperhatikan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan perempuan.

1.6. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam Musrenbangkel

Minimnya tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel kelurahan Laweyan kota Surakarta tahun 2009 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Aktivitas pertemuan musrenbangkel yang sering dilaksanakan pada malam hari;
- b. Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas publik;
- c. Masyarakat yang telah menyakini bahwa perempuan identik dengan domestik;
- d. Faktor rendahnya pendidikan perempuan yang berakibat tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif dan maskulin;
- e. Tidak ada mekanisme yang diciptakan secara khusus agar perempuan yang masih lekat dengan peran domestiknya bisa secara maksimal untuk menjalankan aktivitas publiknya.

B. Saran

1.1. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan permasalahan aktivitas perempuan dengan mensosialisasikan arti pentingnya Musrenbangkel kepada berbagai pihak terutama perempuan sehingga perempuan di kelurahan Laweyan mempunyai kepedulian dan pengetahuan tentang Musrenbangkel.

1.2. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Saran penulis untuk menyelesaikan permasalahan akses yaitu tidak adanya keterlibatan perempuan di dalam komisi fisik dan prasarana yaitu upaya panitia musrenbangkel dengan menempatkan perempuan kedalam semua komisi di musrenbangkel sekalipun banyak perempuan yang lebih memilih untuk ditempatkan kedalam komisi sosial budaya. Dengan menempatkan perempuan dimasing-masing komisi maka perempuan mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

1.3. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Kurangnya kontrol yang dimiliki perempuan dalam musrenbangkel dapat diatasi dengan terus-menerus memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di Musrenbangkel sehingga perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan ditingkat kelurahan tersebut. Dan juga memberikan motivasi intensif kepada perempuan supaya perempuan memanfaatkan peluang dalam Musrenbangkel secara maksimal.

1.4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam Musrenbangkel

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dari faktor-faktor penghambat perempuan dalam berpartisipasi di musrenbangkel, dapat diupayakan dengan:

- a. Menciptakan mekanisme yang secara khusus agar perempuan yang masih terhambat dengan peran domestik dan kultur masyarakat bisa secara maksimal untuk mengikuti Musrenbangkel seperti waktu pelaksanaan Musrenbangkel di hari libur dan di siang hari.
- b. Memberikan motivasi intensif kepada perempuan supaya perempuan memanfaatkan peluang dalam Musrenbangkel secara maksimal.

PEDOMAN WAWANCARA

SKRIPSI

Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif

(Deskripsi Kualitatif Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kelurahan Laweyan, Kota Surakarta)

Pedoman wawancara ini untuk memudahkan penulis dalam sistematika wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara secara terbuka dengan maksud agar informan mengetahui maksud dari materi yang dipertanyakan sehingga penulis mampu menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh dan mendalam.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

A. Profil Aktivitas, dengan pertanyaan:

- 1) Apakah perlu perempuan hadir di forum Musrenbangkel?
- 2) Bagaimana prosentase kehadiran laki-laki dan perempuan di forum Musrenbangkel?
- 3) Apakah prosentase tersebut telah sesuai dengan Juklak dan Juknis yang menyebutkan perempuan minimal 30%?
- 4) Apabila prosentase tidak seimbang, faktor apa yang berpengaruh?

B. Profil Akses dan Kontrol, dengan pertanyaan:

- 1) Apakah perlu perempuan mengajukan usul dan saran di forum Musrenbangkel?

- 2) Apakah perempuan telah memanfaatkan kesempatan di forum Musrenbangkel untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka?
- 3) Apabila belum, faktor apa yang mempengaruhinya?
- 4) Seberapa banyak usul dan saran perempuan yang disepakati untuk menjadi agenda?
- 5) Apakah perempuan telah terlibat dalam susunan keanggotaan forum Musrenbangkel?
- 6) Apakah susunan keanggotaan Musrenbangkel antara laki-laki dan perempuan sudah seimbang?
- 7) Apabila belum, faktor apa yang mempengaruhinya?
- 8) Apakah penting keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di forum Musrenbangkel?
- 9) Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di forum Musrenbangkel?

C. Profil Manfaat, dengan pertanyaan:

1. Apakah laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama dalam pemanfaatan Musrenbangkel?
2. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil Musrenbangkel?
3. Bagaimana dampak hasil Musrenbangkel bagi perempuan dan laki-laki?